



**MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-11.PR.01.03 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA TAHUN 2019**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan
- KEDUA : Target Kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan hak asasi manusia
  3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan
  4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat
- KETIGA : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan Target Kinerja
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal
- KELIMA : Pelaporan sebagaimana diktum keempat diunggah melalui aplikasi target kinerja secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2019
  - b. Bulan Keenam (B06) tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2019
  - c. Bulan Kesembilan (B09) tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2019

d. Bulan keduabelas (B12) paling lambat tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 2019

- KEENAM : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H.LAOLY



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR M.HH-11.PR.01.03 TAHUN 2018

**TARGET KINERJA  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019**

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>						
1.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon I	Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM	B03: 1. Pembentukan Tim penyempurnaan orta Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 2. Inventarisasi dan pemetaan usulan Unit Eselon I	B03: 1. SK TIM 2. Daftar Inventarisasi	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>
				B06: Rapat Internal dengan 6 Unit Eselon I	B06: Dokumen Rapat	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B09: Rapat Internal dengan 5 Unit Eselon I	B09: Dokumen Rapat	
				B12: Rapat Finalisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM	B12: 1. Draft Permenkumham orta kementerian tahun 2019 2. Laporan Kegiatan	
2.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terwujudnya wbk/wbbm di KemenkumHAM	Meningkatnya jumlah satuan kerja berpredikat WBK/WBBM	B03: 1. Pembentukan Tim Kerja Pusat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. menyusun panduan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019 3. mengidentifikasi dan memverifikasi satker yang akan diusulkan	B03: Laporan dan Koordinasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: 1. Penguatan dan pedampingan satker yang telah diusulkan Tim kerja kanwil 2. mengusulkan calon satker yang telah memenuhi syarat berdasarkan rekomendasi tim kerja Pusat	B06: Usulan Satker Menuju WBK dan WBBM	
				B09: 1. tim penilai internal (TPI) melakukan penilaian terhadap calon satker yang diusulkan tim kerja pusat 2. membuat SK penetapan calon satker wbk/wbbm berdasarkan hasil penilaian TPI 3. mengusulkan calon satker wbk/wbbm kepada KeMenpan	B09: Penilaian Terhadap Satker Yang Diusulkan WBK dan WBBM	
				B12: 1. Penguatan satker yang telah diusulkan melalui tindak lanjut evaluasi KeMenpan		

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan wbk/wbbm KemenkumHAM		
3.	Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Kemenkumham yang tertib	Terwujudnya pengelolaan Rumah Negara yang tertib	Tersedianya aturan tentang pengelolaan Rumah Negara	B03 : Penyusunan Kepmenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara	B03 : Kepmenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara	
				B06 : 1. Sosialisasi 2. Implementasi Finalisasi Kepmenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara	B06 : Kepmenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara	
				B09 : Implementasi Kepmenkumham tentang Pengelolaan Rumah Negara	B09 : Data Pengelolaan Rumah Negara pada Satuan Kerja	
				B12 : Evaluasi implementasi Kepmenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara	B12 : Laporan evaluasi implementasi Kepmenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara	



<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
4.	Pengamanan aset tanah Kemenkumham	Terwujudnya pengamanan terhadap tanah Kemenkumham	Meningkatnya jumlah tanah Kemenkumham yang dilakukan pengamanan	B03 : Penyusunan Surat Edaran kepada Kanwil untuk memberikan data aset tanah yang berada dalam penguasaannya	B03 : Surat Edaran	
				B06 : Kajian, penelitian dan penentuan skala prioritas pengamanan	B06 : Hasil kajian, penelitian dan penentuan skala prioritas pengamanan	
				B09 : Pengusulan sertifikasi tanah dan/atau pemasangan tanda batas/ papan nama kepemilikan	B09 : 1. Jumlah tanah yang diusulkan untuk disertipikatkan 2. Jumlah tanah yang dipasang tanda batas dan/atau papan nama kepemilikan tanah	
				B12 : Penyusunan laporan pengamanan tanah tahun 2019	B12 : Laporan pengamanan tanah tahun 2019	
5.	Pengelolaan e-LAPOR	Optimalisasi penanganan e-LAPOR	Meningkatnya jumlah aduan pelapor yang ditindaklanjuti.	B03: Pemetaan dan identifikasi aduan dan penanganan pengaduan dalam e-LAPOR	B03: Dokumen pemetaan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: 1. Pemetaan dan identifikasi aduan dan penanganan pengaduan dalam e-LAPOR 2. Percepatan penanganan pengaduan	B06: 1. Dokumen pemetaan 2. Surat Percepatan penanganan pengaduan pada Kantor Wilayah	
				B09: Pemetaan dan identifikasi aduan dan penanganan pengaduan dalam e-LAPOR	B09: Dokumen Pemetaan dan identifikasi aduan dan penanganan pengaduan dalam e-LAPOR	
				B12: 1. Pemetaan dan identifikasi aduan dan penanganan pengaduan dalam e-LAPOR 2. Monitoring dan Evaluasi	B12: Dokumen Pemetaan, Laporan dan Evaluasi	
6.	Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) melalui migrasi database guna mendukung pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja	Struktur Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang efektif dan efisien Tersedianya database baru yang siap digunakan dalam menyediakan data tunjangan kinerja dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang riil dan	Struktur Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang efektif dan efisien Tersedianya database baru yang siap digunakan dalam menyediakan data tunjangan kinerja dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang riil dan	B03: Optimalisasi struktur databa se pada menu absensi /Daftar Kehadiran	B03: Screenshoot / capture menu Absensi/D aftar Kehadiran telah diupdate	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
	harian pada Kantor Wilayah	cepat dengan Pilot Project adalah 3 (tiga) Kantor Wilayah yaitu Kantor Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)	cepat dengan Pilot Project adalah 3 (tiga) Kantor Wilayah yaitu Kantor Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)			
				B06: Optimalisasi struktur databa se pada menu ijin, cuti dan Dinas Luar	B06: Screenshoot / capture menu ijin, cuti dan dinas luar telah diupdate	
				B09: Optimal isasi struktur databa se pada menu Kinerja	B09: Screenshoot / capture menu kinerja telah diupdate	
				B12: 1. Optimalisasi struktur database pada menu Tunjangan Kinerja 2. Implementasi pembayaran tunjangan kinerja pada Kantor Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	B12: Screenshoot / capture menu tunjangan kinerja telah diupdate Screenshoot / capture pembayar an tunjangan kinerja telah dilaksana kan melalui SIMPEG	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
7.	Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</li> <li>2. Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</li> <li>2. Hasil Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester II TA. 2018 sesuai dengan SAP</li> <li>2. Tersusunnya Draft Pedoman Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan Semester II TA. 2018</li> <li>2. Draft Pedoman Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2019</li> <li>2. Tersusunnya Pedoman Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Sosialisasi Pedoman Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Laporan Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Notula Rapat Persiapan</li> </ol>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2019	
				B09: 1. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA. 2019 2. Terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk bulan Juli sampai September 2019.	B09: 1. Laporan Keuangan Semester I TA. 2019 2. Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester I TA.2019	
				B12: 1. Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang Pejabat Perbendaharaan	B12: 1. Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2019 2. Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Triwulan III TA.2019	
8.	Standarisasi Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan	Tersusunnya Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel di	B03: Rapat persiapan terkait penyusunan draft Keputusan Menteri tentang Standarisasi	B03: Notula Rapat persiapan terkait penyusunan draft Keputusan Menteri	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
	akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
				B06: Tersusunnya Draft Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B06: Draft Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
				B09: Rapat internal dengan Unit Eselon I terkait draft Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B09: Notula Rapat internal dengan Unit Eselon I terkait draft Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
				B12: Pengesahan Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan	B12: Keputusan Menteri tentang Standarisasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	
<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>						
9.	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal	Implementasi SPIP dan meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya SPIP dan tercapainya Tingkat Maturitas SPIP Level 3 (Terdefinisi) pada Kementerian Hukum dan HAM (penilaian oleh BPKP)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Unit Sekretariat Jenderal terkait dengan Penyampaian Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP kepada seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah beserta tindak lanjut</li> <li>Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP melalui koordinasi, Rapat, dan Pelatihan Kantor Sendiri</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal</li> <li>Laporan PKS dan dokumentasi kegiatan</li> </ol>	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>
				B06: Pelaksanaan Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP pada satuan kerja di Lingkungan Kemenkumham	B06: Surat Tugas Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP pada satuan kerja di Lingkungan Kemenkumham	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B09: Pelaksanaan dan Pelaporan Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP pada satuan kerja di Lingkungan Kemenkumham	B09: Laporan pelaksanaan Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP	
				B12: Laporan Kompilasi Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP di Lingkungan Kemenkumham	B12: Laporan Kompilasi Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP	
10.	Terwujudnya survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: Persiapan Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik dan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat melalui koordinasi rapat, dan pelatihan kantor sendiri.	B03: Dokumentasi Kegiatan	
				B06: Evaluasi pelayanan publik dan pengukuran survei kepuasan masyarakat	B06: Capture IKM	
				B09: Evaluasi Pelayanan publik dan pengukuran survei kepuasan masyarakat	B09: Capture IKM	
				B12: Laporan Kompilasi pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan	B12: Laporan Pelaksanaan	



<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat		
11.	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Terbentuknya Zona Integritas menuju satuan kerja WBK/WBBM	Penetapan jumlah satuan kerja yang diusulkan dengan berpredikat WBK/WBBM	B03: Surat keputusan perihal Tim Penilai Internal (TPI) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM	B03: 1. SK Menteri tentang Tim Penilai Internal; 2. SK Irjen tentang Tindak lanjut Tim Penilai Internal	
				B06: 1. PKS Persiapan penilaian mandiri (Self Assessment) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM dengan narasumber dari Kemenpan RB 2. Penilaian Mandiri (Self Assessment) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham	B06: 1. Laporan PKS Persiapan Penilaian Mandiri 2. Surat Tugas Penilaian Mandiri	
				B09: Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham dan usulan satuan kerja yang mendapatkan predikat	B09: Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment)	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				WBK/WBBM kepada Menteri Hukum dan HAM RI		
				B12: Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self Assessment) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham	B12: Laporan Hasil Evaluasi	
12.	Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SAP	Laporan Keuangan sesuai dengan SAP melalui audit, pendampingan, dan reviu	Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM memenuhi WTP	B03: 1. Memetakan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan 2. Laporan Hasil Reviu Kemenkumham tahun 2018 3. Persiapan, rapat koordinasi pelaksanaan reviu LK dan laporan BMN	B03: Laporan Kegiatan	
				B06: Pelaksanaan pengawasan melalui pendampingan dan audit	B06: Laporan Pelaksanaan	
				B09: 1. Pelaksanaan pengawasan melalui pendampingan dan audit 2. Pelaksanaan reviu semester I tahun 2019	B09: Laporan Pelaksanaan dan Hasil Audit	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B12: Laporan hasil pendampingan laporan keuangan dan laporan BMN Tahun 2019	B12: Laporan	
13.	Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP Kemenkumham	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kemenkumham dengan nilai SAKIP minimal BB	Laporan Kinerja dan SAKIP Kemenkumham akuntabel dan berorientasi hasil	B03: 1. Rapat persiapan dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2. Reviu laporan kinerja Kemenkumham	B03: Notulen rapat dan PKS, Laporan Hasil Reviu atas laporan kinerja Kemenkumham	
				B06: Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan forum panel	B06: Laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP Unit/Satker	
				B09: Kompilasi laporan hasil evaluasi	B09: Ikhtisar hasil evaluasi (laporan kompilasi)	
				B12: Monitoring Pelaksanaan Reviu Laporan kinerja dan Evaluasi SAKIP	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
14.	Mengoptimalkan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	Implementasi Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pelaksanaan pelaporan gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: 1. Persiapan Evaluasi pelaporan gratifikasi 2. Evaluasi laporan gratifikasi triwulan I	B03: 1. Notulen Rapat persiapan Evaluasi pelaporan gratifikasi 2. Laporan Evaluasi	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B06: Evaluasi laporan gratifikasi triwulan II	B06 : Laporan Evaluasi	
				B09: Evaluasi laporan gratifikasi triwulan III	B09: Laporan Evaluasi	
				B12: 1. Evaluasi laporan gratifikasi triwulan IV 2. Monitoring laporan gratifikasi	B12: 1. Laporan Evaluasi 2. Laporan Monev	
15.	Terlaksananya Monitoring Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Terselesainya proses pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	B01: Persiapan monitoring melalui koordinasi, rapat dan PKS	B01: Laporan Persiapan monitoring Notulen rapat, dokumentasi kegiatan	
				B03: 1. Pelaksanaan Monitoring 2. Laporan Hasil Monitoring Triwulan I	B03: 1. Surat Tugas 2. Laporan Monitoring Triwulan I	
				B06: 1. Pelaksanaan Monitoring 2. Laporan Hasil Monitoring Triwulan II	B06: 1. Surat Tugas 2. Laporan Monitoring Triwulan II	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B09: 1. Pelaksanaan Monitoring 2. Laporan Hasil Monitoring Triwulan III	B09: 1. Surat Tugas 2. Laporan Monitoring Triwulan III	
				B12: 1. Pelaksanaan Monitoring 2. Laporan Hasil Monitoring Triwulan IV	B12: 1. Surat Tugas 2. Laporan Monitoring Triwulan IV	
16.	Pendampingan PMPRB	Terlaksananya PMPRB Pada Unit Pusat dan Kantor Wilayah	Pendampingan PMPRB	B03: 1. Penyusunan Tim PMPRB; 2. Pelaksanaan PKS PMPRB	B03: Notulen rapat dan PKS, Laporan Hasil Reviu atas laporan kinerja Kemenkumham	
				B06: Pelaksanaan Pendampingan PMPRB	B06: surat tugas pendampingan PMPRB	
				B09: Kompilasi laporan hasil PMPRB	B09: Laporan Kompilasi hasil PMPRB	
				B12: Laporan monitoring dan evaluasi hasil PMPRB	B12: Laporan monitoring dan evaluasi hasil PMPRB	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>						
17.	Pembuatan Aplikasi e-Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan	Terintegrasikannya aplikasi e-Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan ke dalam Website B06:ditjen pp	Integrasi aplikasi e-Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan	B03: Pembuatan aplikasi e-penerjemahan	B03: Modul Aplikasi	<b>DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
				B06: uji coba	B06: Dokumen	
				B09: proses integrasi ke website ditjen pp dan sosialisasi	B09: Dokumen	
				B12: Evaluasi aplikasi e-penerjemahan	B12: LAPORAN	
18.	Terselenggaranya pelayanan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara elektronik	Terlaksananya implementasi E-Status Harmonisasi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan HAM, serta Kesejahteraan Rakyat	Implementasi E-Status Harmonisasi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan HAM, serta Kesejahteraan Rakyat	B03: Penetapan SK Tim	B03: SK Tim	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Uji Coba Pelaksanaan E-Status Harmonisasi	B06: Laporan	
				B09: Pelaksanaan E-Status Harmonisasi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan HAM, serta Kesejahteraan Rakyat	B09: Laporan	
				B12: Laporan pelaksanaan E-Status Harmonisasi.	B12: Laporan	
<b>DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>						
19.	Pelaksanaan Pembaharuan Data Notaris Seluruh Indonesia	Terlaksananya Pembaharuan Data Notaris Seluruh Indonesia	Tersajinya data pembaharuan notaris dalam database notariat	B03: Pembentukan Tim Pembaharuan Data Notaris dan Penyusunan Pemetaan Data	B03: 1. SK Tim 2. Data Pemetaan dan Laporan	<b>DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>
				B06: Pelaksanaan Pembaharuan Data Notaris	B06: Laporan Pembaharuan Data 15% dari jumlah notaris seluruh Indonesia	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan Pembaharuan Data Notaris	B09: Laporan Pembaharuan Data 30% dari jumlah notaris seluruh Indonesia	
				B12: Pelaksanaan Pembaharuan Data Notaris	B12: Laporan Pembaharuan Data 50% dari jumlah notaris seluruh Indonesia	
20.	Kebijakan dalam mendorong Iklim Investasi	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Badan Usaha dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha	Tersusunnya kebijakan terkait Badan Usaha dalam rangka mendukung Penyusunan RUU Badan Usaha	B03: Pembentukan TIM Penyusunan Kebijakan terkait Badan Usaha	B03: 1. Notulen Rapat 2. SK Tim	
				B06: Persiapan Konsepsi Kebijakan terkait Badan Usaha dan penyempurnaan NA	B06: Notulen Rapat dan Laporan	
				B09: Pembahasan Draft Awal Kajian Kebijakan terkait Badan Usaha	B09: 1. Notulen Rapat 2. Draft Awal Kajian	
				B12: Pembahasan Kebijakan terkait Badan Usaha yang mendukung Penyusunan RUU Badan Usaha	B12: Kajian Kebijakan RUU Badan Usaha	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Fidusia dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha	Tersusunnya Kebijakan terkait Fidusia dalam rangka mendukung Penyusunan RUU Fidusia	B03: Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan terkait Fidusia	B03: 1. Notulen Rapat 2. SK Tim	



<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B06: Pembahasan hasil kajian untuk NA RUU Fidusia	B06: Notulen Rapat dan Laporan	
				B09: Pembahasan draft NA RUU Fidusia dan FGD pembahasan draft NA RUU Fidusia	B09: Notulen Rapat dan Laporan FGD	
				B12: Kebijakan terkait Fidusia yang mendukung Penyusunan RUU Fidusia	B12: Penyerahan draft Naskah Akademik terkait Fidusia kepada BPHN (NA) dan Ditjen PP (RUU)	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Kepailitan dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha	Tersusunnya Kebijakan terkait Kepailitan dalam rangka mendukung Penyusunan RUU Kepailitan	B03: Pembentukan SK Tim kebijakan terkait RUU Kepailitan dan Pembentukan SK komite Bersama serta Pembahasan Final Draft RUU Kepailitan	B03: Notulen Rapat, Laporan dan SK TIM	
				B06: Pembahasan RUU Kepailitan	B06: Notulen Rapat dan Laporan	
				B09: Pembahasan lanjutan draft RUU Kepailitan dan FGD pembahasan draft RUU Kepailitan	B09: Notulen Rapat dan Laporan	
				B12: Finalisasi RUU Kepailitan	B12: Penyerahan Draft Naskah RUU terkait Kepailitan kepada Ditjen PP	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		Implementasi Kebijakan terkait <i>Beneficial Ownership</i> (BO)	Kebijakan terkait <i>Beneficial Ownership</i> (BO) terimplementasi ke dalam sistem administrasi badan hukum	B03: Penyempurnaan Draft Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian BO	B03: Draft Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian BO	
				B06: Penetapan Permenkumham tentang Tata cara Penyampaian BO	B06: Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian BO	
				B09: Diseminasi Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian BO	B09: Laporan Diseminasi Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian BO	
				B12: Kebijakan BO terimplementasi ke dalam sistem	B12: Capture sistem yang telah terintegrasi dengan BO	
21.	Penyusunan Surat Edaran Juklak Juknis Digitalisasi Data Sertifikat Jaminan Fidusia	Surat Edaran Juklak Juknis Digitalisasi Data Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi dasar untuk digitalisasi Arsip Sertifikat Jaminan Fidusia di wilayah	Tersusunnya Surat Edaran Juklak Juknis Digitalisasi Data Sertifikat Jaminan Fidusia	B03: Penyusunan Surat Edaran Juklak Juknis Digitalisasi Data Sertifikat Jaminan Fidusia	B03: Surat Edaran Juklak Juknis Digitalisasi Data Sertifikat Jaminan Fidusia	
				B06: Sosialisasi Surat Edaran Juklak Juknis Digitalisasi Data	B06: Laporan Sosialisasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kanwil		
22.	Penggunaan Aplikasi Penanganan Permintaan, Pembentukan Perjanjian, dan <i>Data Base</i> Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi	Peningkatan kualitas penanganan permintaan, pembentukan perjanjian, dan <i>data base</i> Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi	Tersedianya sistem informasi penanganan permintaan dan pembentukan perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang terintegrasi dengan unit/intansi berkepentingan	B03: Koordinasi awal dan pemetaan kebutuhan antar unit / instansi berkepentingan	B03: Laporan	
				B06: Uji Coba Aplikasi I	B06: Laporan progress uji coba aplikasi I (50%)	
				B09: Uji Coba Aplikasi II	B09: Laporan progress uji coba aplikasi II (100%)	
				B12: Evaluasi	B12: Laporan hasil evaluasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</b>						
23.	Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan	Meningkatnya kualitas program pelayanan tahanan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum	B03: 1. Penyampaian Edaran tentang peningkatan kualitas pelayanan tahanan 2. Penyusunan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum 3. ToT dan sosialisasi pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	B03: 1. Surat Penyampaian Edaran tentang peningkatan kualitas pelayanan tahanan 2. Indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum 3. Laporan ToT dan sosialisasi pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan	<b>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</b>
				B06: Supervisi pelaksanaan manajemen kegiatan layanan kepribadian dan layanan hukum	B06 Laporan Supervisi pelaksanaan manajemen kegiatan layanan kepribadian	
				B09: Supervisi pelaksanaan kegiatan layanan kepribadian dan layanan hukum terhadap tahanan	B09: Laporan Supervisi pelaksanaan kegiatan layanan kepribadian dan layanan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
			Asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan yang telah memiliki kekuatan hukum	B03 : ToT pedoman asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan	B03: Laporan ToT pedoman asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan	
				B06: Pelaksanaan pelatihan dan eksistensi Asesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan pada wilayah	B06: Laporan pelaksanaan pelatihan dan eksistensi Asesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan pada wilayah Pangkal Pinang dan Surabaya.	
				B09: Supervisi Asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan	B09: Laporan Supervisi Asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan	
				B12: Supervisi Asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan	B12: Laporan Supervisi Asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan	
		Menurunnya jumlah overstaying dengan penerapan TI dan pertukaran data antar institusi penegak hukum	Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang	B03: Target 10 UPT 1. Penetapan 98 UPT Lapas/Rutan yang tunjuk melaksanakan SPPT TI	B03: 1. SK Penetapan 98 UPT 2. SK Tim dan SOP tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		pada 98 (Sembilan puluh delapan) UPT	transparan, efektif, efisien di lima wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembentukan Tim dan Penyusunan SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI</li> <li>3. Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum terkait pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 10 (sepuluh) UPT Lapas/Rutan</li> <li>4. Penyampaian SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI di 98 (sembilan puluh delapan) UPT Lapas/Rutan</li> <li>5. Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 10 (sepuluh) UPT Lapas/Rutan</li> <li>6. Supervisi Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 10 (sepuluh) UPT Lapas/Rutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SPPT TI di 10 (sepuluh) UPT</li> <li>3. Laporan rapat koordinasi</li> <li>4. Laporan penyampaian SOP</li> <li>5. Laporan pertukaran data</li> <li>6. Laporan supervisi</li> </ol>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Target 36 UPT 1. Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum terkait pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 36 (tiga puluh enam) UPT Lapas/Rutan 2. Penyampaian SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI di 36 (tiga puluh enam) UPT Lapas/Rutan 3. Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 36 (tiga puluh enam) UPT Lapas/Rutan 4. Supervisi Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 36 (tiga puluh enam) UPT Lapas/Rutan	B06: 1. Laporan rapat koordinasi 2. Laporan penyampaian SOP 3. Laporan pertukaran data 4. Laporan supervisi	
				B09: Target 20 UPT 1. Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum	B09: 1. Laporan rapat koordinasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				<p>terkait pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 20 (dua puluh) UPT Lapas/Rutan</p> <p>2. Penyampaian SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI di 20 (dua puluh) UPT Lapas/Rutan</p> <p>3. Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 20 (dua puluh) UPT Lapas/Rutan</p> <p>4. Supervisi Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 20 (dua puluh) UPT Lapas/Rutan</p>	<p>2. Laporan penyampaian SOP</p> <p>3. Laporan pertukaran data</p> <p>4. Laporan supervisi</p>	
				<p>B12: Target 27 UPT</p> <p>1. Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum terkait pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di</p>	<p>B12:</p> <p>1. Laporan rapat koordinasi</p> <p>2. Laporan penyampaian SOP</p> <p>3. Laporan pertukaran data</p> <p>4. Laporan supervisi</p>	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				27 (dua puluh tujuh) UPT Lapas/Rutan 2. Penyampaian SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI di 27 (dua puluh tujuh) UPT Lapas/Rutan 3. Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 27 (dua puluh tujuh) UPT Lapas/Rutan 4. Supervisi Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum di 27 (dua puluh tujuh) UPT Lapas/Rutan		
		Meningkatnya kualitas program pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan	1. Terbentuknya Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> di setiap wilayah 2. Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Masyarakat yang ditetapkan	B03: 1. Penetapan Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> 2. Penyampaian SE pedoman perlakuan di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> 3. ToT dan sosialisasi bagi asesor 4. Terlaksananya sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan	B03: 1. Surat Keputusan Penetapan Lapas Maksimum 2. SE pedoman perlakuan di Lapas Maksimum 3. Laporan ToT 4. Laporan Terlaksananya sosialisasi Petunjuk	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			3. Terlaksananya Pemindahan Narapidana Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan 5. Menerbitkan SK pemindahan Narapidana Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT 5. SK pemindahan Narapidana Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	
				B06: 1. Supervisi pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> 2. Supervisi manajemen pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan yang ditetapkan	B06: 1. Laporan supervisi pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> 2. Laporan Supervisi manajemen pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan yang ditetapkan.	
				B09: 1. Supervisi pelaksanaan pedoman pembinaan narapidana di Lapas	B09: 1. Laporan supervisi pelaksanaan pedoman pembinaan narapidana di Lapas	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				<i>maximum, medium, minimum</i> 2. Supervisi teknis pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan yang ditetapkan	2. Laporan Supervisi teknis pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan yang ditetapkan	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		Pemberian hak secara tepat waktu kepada Narapidana melalui online sistem	Meningkatnya layanan pemberian Remisi, PB, CB dan CMB secara Online pada Lapas dan Rutan	B03: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara Online 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara Online sebanyak <del>12.000</del> 15.000 orang	B03: 1. Laporan pelaksanaan layanan pemberian remisi secara Online 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara Online	
				B06: 1. Terlaksananya pemberian remisi secara online 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara Online sebanyak <del>24.000</del> 15.000 orang	B06: Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara Online	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: 1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Layanan pemberian PB, CB dan CMB secara Online 2. Terlaksananya pemberian Remisi secara Online 3. Terlaksananya pemberian, PB, CB dan CMB secara Online sebanyak 36.000 orang	B09: 1. Laporan Pelaksanaan Bimtek 2. Laporan Pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara Online	
				B12: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara Online 2. Terlaksananya pemberian PB, CB, CMB secara Online sebanyak 15.000 orang	B12: Laporan Pelaksanaan pemberian Remisi serta PB, CB dan CMB secara Online	
		Keberlanjutan kegiatan industri di Lapas Produktif (Lapas minimum)	Meningkatnya jumlah WBP yang bekerja di Lapas Produktif	B03: 1. Pemetaan Kegiatan Industri di Lapas Produktif 2. Penyusunan Instrumen kegiatan industri di Lapas Produktif 3. Penyusunan pedoman penilaian kualitas hasil kegiatan industri di Lapas Produktif	B03: 1. Laporan Dokumen Pemetaan 2. Instrumen kegiatan industri di Lapas Produktif 3. pedoman penilaian kualitas hasil kegiatan industri di Lapas Produktif	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: 1. Penetapan Lapas Produktif 2. Sosialisasi sistem <i>e-commerce</i> dan upload hasil karya narapidana	B06: Laporan Pelaksanaan	
				B09: 1. Supervisi kegiatan industri di Lapas Produktif dan 2. Pemasaran hasil kegiatan industri melalui media online	B09: Laporan kegiatan supeervisi Industri diLapas	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	
		Meningkatnya fungsi pembimbingan klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan HAM	Terlaksananya penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	B03: 1. Penyampaian Edaran penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan 2. Penyusunan Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan.	B03 : 1. Surat penyampaian edaran penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan 2. Dokumen Program Pembimbingan	
				B06: ToT dan sosialisasi pedoman Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan.	B06: Laporan Pelaksanaan ToT dan sosialisasi pedoman Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan.	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Supervisi Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan.	B09: Laporan supervisi Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan monitoring dan Evaluasi	
		Meningkatkan fungsi pengelolaan basan dan baran dalam rangka jaminan perlindungan atas barang bukti yang disita atau dirampas agar terjaga nilai dan keutuhannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT di 64 Rupbasan</li> <li>2. Terlaksananya registrasi basan baran menggunakan aplikasi barcode di 5 Rupbasan</li> <li>3. Terintagsinya data antara rupbasan dan rutan</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT</li> <li>2. Terinstalnya sistem pendataan berbasis IT di UPT Rupbasan</li> <li>3. Tot dan sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan Penyusunan pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT</li> <li>2. Screen shot system pendataa berbasis IT di UPT Rupbasan</li> <li>3. Laporan Tot dan sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT</li> </ol>	
				B06: Supervisi pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	B06: Laporan pelaksanaan Supervisi pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B09: Supervisi terhadap pelaksanaan sistem pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	B09: Laporan pelaksanaan Supervisi terhadap pelaksanaan sistem pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan monev	
		Meningkatnya kualitas pencegahan gangguan kamtib melalui optimalisasi fungsi intelejen	optimalisasi fungsi intelejen	B03: 1. Penyampaian Edaran tentang standar intelejen masyarakatan 2. ToT dan sosialisasi standar intelejen masyarakatan	B03: 1. Surat penyampaian edarandaran tentang standar intelejen masyarakatan 2. Laporan hasil ToT dan sosialisasi standar intelejen masyarakatan	
				B06: Supervisi manajemen pelaksanaan kegiatan intelejen	B06: Laporan pelaksanaan Supervisi manajemen pelaksanaan kegiatan intelejen	
				B09: Supervisi teknis pelaksanaan kegiatan kegiatan intelejen	B09: Laporan pelaksanaan Supervisi teknis	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					pelaksanaan kegiatan kegiatan intelejen	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan pelaksanaan dan evaluasi	
		Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Regulasi Teknis Pengamanan</li> <li>2. Tersedianya petugas pengamanan yang profesional pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum</li> <li>2. ToT dan sosialisasi SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum</li> <li>2. Laporan ToT dan sosialisasi SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum</li> </ol>	
				B06: Supervisi manajemen pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	B06: Laporan pelaksanaan Supervisi manajemen pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Supervisi teknis pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	B09: Laporan pelaksanaan Supervisi teknis pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan pelaksanaan dan evaluasi	
		Pemenuhan hak identitas anak	Setiap anak mempunyai kartu identitas anak	B 03 : 1. Inventarisasi data anak di LPKA seluruh Indonesia yang belum mempunyai identitas diri 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan hak identitas 3. Perekaman data anak sebesar 100%	B03: 1. Data Jumlah Anak yang belum memiliki identitas diri di LPKA seluruh Indonesia 2. Laporan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan hak identitas 3. Laporan data 100% anak yang direkam	
				B 06 : Supervisi manajemen pelaksanaan kegiatan inventarisasi data anak di LPKA seluruh Indonesia yang belum mempunyai identitas diri	B06: Laporan supervisi manajemen pelaksanaan kegiatan inventarisasi data anak di LPKA seluruh Indonesia yang belum mempunyai identitas diri	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09 : Supervisi teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi data anak di LPKA seluruh Indonesia yang belum mempunyai identitas diri	B09: Laporan Supervisi teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi data anak di LPKA seluruh Indonesia yang belum mempunyai identitas diri	
				B12 : 1. Terpenuhiya identitas anak sebesar 50% 2. Monitoring dan Evaluasi	B12: 1. Laporan Pelaksanaan pemenuhan 50% identitas anak 2. Laporan Monitoring dan evaluasi	
<b>DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI</b>						
24.	Meningkatkan Citra Positif pada pelaksanaan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Publikasi	Terlaksananya penyebaran informasi melalui media elektronik, media cetak dan media sosial	Terciptanya citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2019	B03: Pelatihan tentang cara melakukan publikasi kebijakan terkait pengawasan keimigrasian dan pelayanan keimigrasian serta publikasi di media sosial	B03: Laporan Dokumen Pelaksanaan	<b>DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI</b>
				B06: Publikasi kebijakan terkait pelayanan keimigrasian dan pengawasan keimigrasian di Kompas Group, Metro TV Group, TV One Group, Trans TV Group, Radio Elshinta.	B06: Laporan Dokumen Pelaksanaan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Publikasi terkait tusi ditjenim di Tempo Group, Berita Satu TV Group, MNC/i-News TV Group, TVRI dan RRI	B09: Laporan Dokumen Pelaksanaan	
				B12: Evaluasi kegiatan publikasi terkait tusi Ditjenim	B12: Evaluasi dan Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi	
25.	Pengajuan Direktorat Intaltuskim dan Lantaskim untuk diusulkan mendapatkan predikat WBK di tahun 2019	Pelayanan Izin Tinggal dan Visa mendapat predikat WBK di tahun 2019	Direktorat Jenderal Imigrasi mendapat predikat WBK di tahun 2019	B03: Tersusunnya Tim Kerja WBK/WBBM dan Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	B03: 1. SK Tim 2. Laporan dan dokumen	
				B06: Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui Penandatanganan Komitmen Bersama, Sosialisasi dan Studi Tiru	B06: Laporan dan Dokumen	
				B09: Implementasi Direktorat Lantaskim dan Intaltuskim	B09: Laporan dan Dokumen	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi WBK/WBBM		
				B12: Evaluasi kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	B12: Laporan dan Dokumen	
26.	Restrukturisasi SIMKIM Terbarukan	Terwujudnya pembaharuan arsitektur SIMKIM Terbarukan	Terimplementasikannya SIMKIM terbaru dengan arsitektur terbaru di 15 UPT sebagai lokasi Pilot Project	B03: Persiapan dokumentasi Perluasan Implementasi SIMKIM terbaru	B03: Dokumen dokumentasi Perluasan Implementasi SIMKIM terbaru	
				B06: Pengembangan SIMKIM terbaru	B06: Dokumen pengembangan SIMKIM terbaru	
				B09: Pengiriman perangkat keras SIMKIM terbaru ke lokasi UPT  Instalasi aplikasi dan perangkat keras SIMKIM terbaru	B09: Dokumen Kegiatan Pengiriman dan Instalasi Konfigurasi Aplikasi dan Perangkat	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B12: Implementasi Aplikasi SIMKIM terbaru di 15 lokasi	B12: Laporan Kegiatan Implementasi SIMKIM terbaru	
27.	Penguatan Pengawasan keimigrasian melalui penguatan Tim PORA	Terlaksananya penegakan hukum keimigrasian melalui penguatan Tim PORA	Terlaksananya kegiatan pengawasan Orang Asing melalui Tim PORA di tingkat Kecamatan	B03: Rapat Koordinasi pengawasan rencana strategis tentang pembentukan TIM PORA sampai ke tingkat Kecamatan di seluruh kabupaten dan kota	B03: SK Tim PORA Tingkat Kecamatan	
				B06: Rapat Koordinasi TIM PORA tingkat Nasional untuk pembentukan TIM PORA sampai tingkat Kecamatan di seluruh kabupaten dan kota	B06: Laporan dan Dokumensi Pelaksanaan	
				B09: Pelaksanaan hasil rapat koordinasi TIM PORA tingkat nasional dengan cara uji petik di Kanimkus dan Kanim Kelas I	B09: Laporan dan Dokumensi Pelaksanaan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Evaluasi dan Laporan pelaksanaan hasil Rakornas TIM PORA sekaligus pemilihan TIM PORA kecamatan terbaik se Indonesia	B12: Laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan	
28.	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian	Terlaksananya Penegakan Hukum Keimigrasian berupa Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian	80% LHK tersangka dalam penyidikan dari Target Perjanjian Kinerja  Mengungkap 10 kasus yang melibatkan pengusaha, sponsor, sindikat TPPO/pemalsuan data dalam pembuatan paspor bagi calon PMI/TKI atau perekrutan TKA dan penanganan KITAS TKA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk mendapatkan data tentang pelaku/pengurus/sindikata yang dapat dijadikan target penyidikan	B03: Evaluasi Terhadap Hasil penolakan paspor dari pemberangkatan ke luar negeri di TPI selama tahun 2018 dan pengawasan kasus TKA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk mendapatkan data tentang pelaku/pengusaha/sindikata yang dapat dijadikan target penyidikan	B03: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	
				B06: Penyidikan 3 Tersangka	B06: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Penyidikan 3 Tersangka	B09: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	
				B12: 1. Penyidikan 4 Tersangka 2. Pengevaluasian dan laporan	B12: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	
29.	Pengelolaan dan Tindak Lanjut Data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)	Tersedianya Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Data Anak Berkewarganegara-an Ganda (ABG)	Terlaksanya Aplikasi Pengolahan Data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)	B03: Pembuatan aplikasi Pengkoordinasian dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian bersama Ditjen AHU Pembuatan SOP, Peraturan perUUan	B03: 1. SK Tim 2. Kajian Balitbang Hukum tentang Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Data Anak Berkewaranegaraan Ganda (ABG) yang terintegrasi antara Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU 3. Hasil kajian dan rekomendasi Balitbang HAM	
				B06: 1. Internalisasi dan Sosialisasi dalam negeri dan luar negeri 2. Penyelarasan SOP penggunaan Aplikasi Pendataan dan Pengolahan	B06: Kegiatan Konsinyering Penyusunan SOP penggunaan Aplikasi Pendataan dan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) 3. Pengesahan SOP penggunaan Aplikasi Pendataan, Pengolahan Data dan Penyelesaian Kasus Anak Berkewargaengaraan Ganda (ABG)	Pengolahan Data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)	
				B09: Penyelesaian kasus: 1. Internalisasi Uji Coba Implementasi Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) pada 10 Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri 2. Uji Coba Implementasi Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Data Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) pada 10 Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri 3. Laporan pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi	B09: Laporan dan Dokumentasi	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Pendataan dan Pengolahan Data Anak Berkewargaengaraan Ganda (ABG) pada 10 kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri		
				B12: Evaluasi pelaksanaan Implementasi Aplikasi Pendataan dan Pengolahan Data Anak Berkewargaengaraan Ganda (ABG) pada seluruh Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri	B12: Laporan dan dokumentasi evaluasi	
30.	Peningkatan Jumlah Penerbitan Paspor Elektronik	Terwujudnya Peningkatan Jumlah Penerbitan Paspor Elektronik di 27	Terlaksananya penerbitan paspor elektronik di 27 (dua puluh tujuh) Kantor Imigrasi	B03: Terbitnya SK Tim Peningkatan Jumlah Penerbitan Paspor Elektronik	B03: SK Tim Peningkatan Jumlah Penerbitan Paspor Elektronik	
				B06: Penyiapan sosialisasi di Kantor Imigrasi dan brosur/flyer untuk masyarakat	B06: Bahan sosialisasi di Kantor Imigrasi dan brosur/flyer untuk masyarakat	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan sosialisasi di Kantor Imigrasi dan penyiapan brosur/flyer untuk masyarakat	B09: Laporan dan dokumen sosialisasi	
				B12: Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Jumlah Penerbitan Paspor Elektronik	B12: Laporan dan dokumen evaluasi	
31.	Peningkatan pengawasan keimigrasian dalam penerbitan paspor dan keberangkatan WNI di TPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya supervisi pada Kantor Imigrasi dan TPI dalam penerbitan paspor dan pengawasan WNI di TPI</li> <li>2. Terlaksana kerjasama antara bidang/seksi lantaskim dengan bidang/seksi inteldak di Kanim untuk mencegah PMI yang direkrut secara ilegal oleh sindikat perdagangan orang</li> </ol>	Kompilasi data penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di TPI oleh Kabid/Kasi lantaskim dikoordinasikan dan ditindak-lanjuti Kabid/Kasi Inteldak Kanim dengan proses penyelidikan terhadap pelaku yang merekrut calon PMI secara ilegal	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan internalisasi kepada seluruh Kepala Divisi Keimigrasian</li> <li>2. Koordinasi dan internalisasi ke seluruh Kanim</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Dirjenim ke Kanwil penguatan peran divisi dalam supervisi kantor Imigrasi dan TPI</li> <li>2. Laporan dan dokumen</li> </ol>	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B06: Data penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di TPI bulan 1-3 sudah ditindaklanjuti oleh Kabid/kasi inteldak Kanim	B06: Laporan dan dokumen	
				B09: Data penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di TPI bulan 4-6 sudah ditindaklanjuti oleh Kabid/kasi inteldak Kanim	B09: Laporan dan dokumen	
				B12: Data penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di TPI bulan 7-9 sudah ditindaklanjuti oleh	B12: Laporan dan dokumen	
32.	Pengawasan terhadap orang asing dengan	Penggunaan QR Code untuk memudahkan pengawaasn orang asing	Terbentuknya Rancangan Perpres tentang penggunaan QR Code	B03: 1. Rakornas untuk sosialisasi dan internalisasi penggunaan	B03: Laporan dan dokumen	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
	menggunakan QR Code secara nasional	dipahami oleh stakeholder terkait	untuk pengawasan orang asing di Indonesia	<p>QR Code dalam pengawasan orang asing</p> <p>2. Penyiapan TIM Pengawas R-konsep Perpres tentang Penggunaan QR Code untuk pengawasan orang asing di Indonesia</p>		
				<p>B06:</p> <p>1. Pencetakan stiker untuk QR Code yang akan ditempelkan di Paspor WNA atau di lembar lain</p> <p>2. Koordinasi dengan Ditjen PP dan Instansi terkait untuk pengajuan Rancangan Perpres</p>	<p>B06:</p> <p>Laporan dan dokumen</p>	
				<p>B09:</p> <p>1. Uji coba penempelan QR Code</p> <p>2. R-konsep Perpres dimaksimalkan</p>	<p>B09:</p> <p>Laporan dan dokumen</p>	
				<p>B12:</p> <p>1. Penempelan QR Code dievaluasi dan diujicoba pengawasannya</p>	<p>B12:</p> <p>Laporan dan dokumen</p>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				2. Rancangan regulasi berupa Perpres terkait Implementasi QR Code bagi stakeholder		
<b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>						
33.	Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi layanan Kekayaan Intelektual	Kemudahan masyarakat mengakses layanan administrasi permohonan Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	Tersedianya fasilitas administrasi Permohonan Kekayaan Intelektual dan Informasi Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS yang dapat diakses masyarakat.	B03: Analisis kebutuhan pengembangan sistem melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS dan spesifikasi terkait dengan pengembangan sistem	B03: 1. Laporan kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan beserta lampiran berupa surat undangan rapat koordinasi, notula rapat koordinasi, daftar hadir dan dokumentasi foto 2. Laporan analisa kebutuhan pengembangan sistem.	<b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
				B06: Pembuatan purwa rupa (prototype) aplikasi TemanKita-Merek dan layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS	B06: Laporan pembuatan aplikasi dan rekam layar aplikasi TemanKita-Merek layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B09: System Integration Testing dan User Acceptance Test dan Soft Launching aplikasi TemanKita-Merek dan layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS	B09: Laporan SIT dan UAT aplikasi Teman Kita-Merek dan layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS dan laporan kegiatan soft launching	
				B12: System Integration Testing dan User Acceptance Test,dan Grand Launching aplikasi TemanKita-Merek dan layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS	B12: Laporan SIT dan UAT aplikasi TemanKita-Merek dan layanan portal web DJKI melalui Mobile Apps berbasis android dan IOS dan laporan kegiatan grand launching	
34.	Optimalisasi Pemahaman Desain Industri dan Merek terhadap Agen-Agen Diseminasi kekayaan intelektual	Jumlah agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang telah memperoleh diseminasi Desain Industri dan Merek	Jumlah Agen-Agen Diseminasi kekayaan intelektual yang mengikuti kegiatan Diseminasi Desain Industri dan Merek	B03: Penyusunan Action Plan Diseminasi Desain Industri dan Merek	B03: Action Plan Diseminasi Desain Industri dan Merek	
				B06: Penyiapan dan penyusunan Draft Modul Berjenjang Diseminasi Desain Industri dan Merek	B06: Draft Modul Berjenjang Diseminasi Desain Industri dan Merek	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Launching Modul Berjenjang Diseminasi Desain Industri dan Merek	B09: Modul Berjenjang Diseminasi Desain Industri dan Merek	
				B12: Agen-Agen Diseminasi kekayaan intelektual yang mengikuti kegiatan Diseminasi Desain Industri dan Merek(Training Of Trainer)	B12: Laporan terkait pelaksanaan kegiatan Agen-Agen Diseminasi Kekayaan Intelektual yang mengikuti kegiatan Diseminasi Desain Industri dan Merek (Training Of Trainer)	
35.	Optimalisasi Pelayanan penerimaan pengaduan penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	kemudahan masyarakat dalam melakukan penelurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	Aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	B03:  Analisis kebutuhan pengembangan aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	B03:  1. Laporan kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal beserta lampiran berupa surat undangan rapat koordinasi, notula rapat koordinasi, daftar hadir dan dokumentasi foto  2. Laporan analisa kebutuhan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					pengembangan aplikasi	
				B06: Pembuatan purwa rupa (prototype) aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	B06: Laporan pembuatan aplikasi dan rekam layar aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	
				B09: System Integration Testing dan User Acceptance Test dan Soft Launching aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	B09: Laporan SIT dan UAT aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS dan laporan kegiatan soft launching	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Integration Testing dan User Acceptance Test dan Grand Launching aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS	B12: Laporan SIT dan UAT aplikasi penulurusan status dan notifikasi pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui Mobile Apps berbasis Android dan IOS dan laporan kegiatan grand launching	
<b>DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA</b>						
36.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 oleh Sekretariat Bersama	Tersedianya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024	B03: Rapat Koordinasi pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 oleh Sekretariat Bersama	B03: Notulen rapat pembahasan dan rancangan awal Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024	<b>DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA</b>
				B06: Harmonisasi rancangan final Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024	B06: Notulen rapat harmonisasi dan rancangan final Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Penyampaian rancangan final Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 ke Sekretariat Negara	B09: Surat penyampaian rancangan final Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 ke Sekretariat Negara	
				B12: Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024	B12: Diterimanya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 oleh Sekterariat Negara	
37.	Mendorong Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring serambi Kantor Staf Presiden <a href="https://serambi.ksp.go.id">https://serambi.ksp.go.id</a>	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring serambi Kantor Staf Presiden <a href="https://serambi.ksp.go.id">https://serambi.ksp.go.id</a>	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi HAM	B03: Koordinasi dengan Sekretariat Bersama tentang pelaksanaan Aksi HAM	B03: 1. Dokumen kesepakatan antara setber dan K/L terkait 2. Terbitnya SE Mendagri tentang pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM Tahun 2019 3. Laporan koordinator setber kepada kemenko mengenai capaian Aksi HAM tahun 2018 4. Laporan koordinator setber kepada presiden mengenai capaian aksi HAM Tahun 2018	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					5. Rekapitulasi capaian Tahun sebelumnya	
				B06: Koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk melaporkan capaian Aksi HAM per Juni 2019	B06: 1. Laporan koordinator setber kepada Kementerian Koordinator dengan tembusan ke K/L terkait tentang capaian Aksi HAM B03 Tahun 2019 2. Laporan koordinator setber kepada Kemendagri dengan tembusan ke Kantor Wilayah tentang capaian Aksi HAM B03 Tahun 2019 3. Rekapitulasi capaian Aksi HAM B03 Tahun 2019	
				B09: Koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk melaporkan capaian Aksi HAM per September 2019	B09: 1. Laporan koordinator setber kepada kemenko dengan tembusan ke K/L terkait tentang capaian Aksi HAM B06 Tahun 2019 2. Laporan koordinator setber kepada	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					<p>Kemendagri dengan tembusan ke Kantor Wilayah tentang capaian Aksi HAM B06 Tahun 2019</p> <p>3. Rekapitulasi capaian Aksi HAM B06 Tahun 2019</p>	
				<p>B12: Koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk melaporkan capaian Aksi HAM per Desember 2019</p>	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan koordinator setber kepada kemenko dengan tembusan ke K/L terkait tentang capaian Aksi HAM B09 Tahun 2019</li> <li>2. Laporan koordinator setber kepada Kemendagri dengan tembusan ke Kantor Wilayah tentang capaian Aksi HAM B09 Tahun 2019</li> <li>3. Rekapitulasi capaian Aksi HAM B09 Tahun 2019</li> </ol>	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
38.	Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terlaksananya penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	B03: Persiapan koordinasi pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	B03: Surat koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM	
				B06: Koordinasi pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	B06: Surat Koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM tentang notifikasi jadwal pelaksanaan penilaian Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM ke Aplikasi KKPHAM ( <i>kkp.ham.go.id</i> )	
				B09: Pelaksanaan penerimaan data penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	B09: Rekapitulasi penerimaan data penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	B12: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Tahun 2018	
39.	Penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM	Terlaksananya penanganan oleh instansi terkait	100 kasus dugaan pelanggaran HAM telah ditangani oleh instansi terkait	B03: 25 kasus B06: 25 kasus B09: 25 kasus B12: 25 kasus	B03 – B12: Surat tanggapan instansi terkait/ hasil rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan	
<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>						
40.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	1. Meningkatnya Kualitas layanan Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum 2. Meningkatnya layanan yang diberikan Panitia	1. Meningkatnya rata-rata skor indeks kinerja OBH secara nasional; dan 2. Meningkatnya jumlah penerima Bantuan Hukum	B 03: Pelatihan penilaian kepuasan layanan bantuan hukum	B 03: 1. SK Panitia Pelaksana; 2. Daftar hadir peserta; dan Dokumentasi	<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		Pengawas Daerah terhadap administrasi				
				B 06: Konferensi Nasional Bantuan Hukum	B 06: 1. SK Panitia Pelaksana; 2. Daftar hadir peserta; dan Dokumentasi	
				B 09: Pelaksanaan E-monev di seluruh provinsi di Indonesia	B 09: Manual book e-monev	
				B 12: Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum	B 12: Data perbandingan Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum dengan tahun 2018	
41.	Bertambahnya Media Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya tayangan Penyuluhan dan Bantuan Hukum</li> <li>2. Terpenuhinya Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum Dalam Bentuk Cetak</li> <li>3. Terlaksananya Kegiatan Media Komunikasi dalam bentuk audio kanal hukum, media social/website, dan aplikasi akses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya 4 Film Pendek dan 1 Film Dokumenter Penyuluhan dan Bantuan Hukum</li> <li>2. Terpenuhinya bahan/modul untuk kegiatan penyuluhan hukum berupa Liflet (8000 eks) dan Stiker (4000 eks)</li> <li>3. Terpublikasinya kegiatan dan hasil</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan materi Sinopsis dan skenario serta survey Lokasi untuk Pelaksanaan Pembuatan Film.</li> <li>2. Pembuatan materi, konsep desain Liflet dan Stiker</li> <li>3. Publikasi berita kegiatan penyuluhan hukum/ informasi hukum pada website dan aplikasi akses</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas</li> <li>2. Notula Rapat</li> <li>3. Sinopsis</li> <li>4. Dokumentasi Foto</li> <li>5. Bahan Materi Liflet dan Stiker</li> <li>6. Foto Kegiatan Produksi Kanal Hukum dan screen shot publikasi hasil rekaman di</li> </ol>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		<p>penyuluhan dan bantuan hukum pada smartphone</p>	<p>kerja JFT Penyuluhan Hukum kedalam Website Penyuluhan dan Bantuan Hukum (luhkum.bphn.go.id dan lsc.bphn.go. id), dan pada aplikasi akses penyuluhan dan bantuan hukum versi android dan ios;</p> <p>4. Meningkatnya jumlah pengunjung pada media social penyuluhan dan bantuan hukum</p> <p>5. Terlaksananya Perekaman audio Kanal Hukum bekerjasama dengan Kanal KPK</p>	<p>penyuluhan dna bantuan hukum</p> <p>4. Publikasi informasi hukum pada social media penyuluhan dan bantuan hukum</p> <p>5. Perekaman audio Kanal Hukum bekerjasama dengan Kanal KPK sebanyak 8 materi</p>	<p>website penyuluhan hukum</p> <p>7. Screen shot jumlah berita yang dipublikasikan</p> <p>8. Screen shot statistic pengunjung di social media</p>	
				<p>B06:</p> <p>1. Pelaksanaan Proses Pembuatan/Shooting Film Pendek dan Film documenter</p> <p>2. Cetakan Materi stiker dan liflet Penyuluhan Hukum terlaksana</p> <p>3. Publikasi berita kegiatan penyuluhan hukum/ informasi</p>	<p>B06:</p> <p>1. Foto Proses Pembuatan/ Shooting Film</p> <p>2. Bahan Materi liflet dan Stiker Pengesahan Finalisasi dari Kepala Pusat Penyuluhan</p>	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				<p>hukum pada website dan aplikasi akses penyuluhan dna bantuan hukum</p> <p>4. Publikasi informasi hukum pada social media penyuluhan dan bantuan hukum</p> <p>5. Perekaman audio Kanal Hukum bekerjasama dengan Kanal KPK sebanyak 8 materi</p>	<p>Hukum akan materi yang akan dicetak</p> <p>3. Foto Kegiatan Produksi Kanal Hukum dan screen shot publikasi hasil rekaman di website penyuluhan hukum</p> <p>4. Screen shot jumlah berita yang dipublikasikan</p> <p>5. Screen shot statistic pengunjung di social media</p>	
				<p>B09:</p> <p>1. Editing dan bedah film yang telah di produksi/hasil shooting</p> <p>2. Terdistribusikannya Liflet dan Stiker Penyuluhan Hukum</p> <p>3. Publikasi berita kegiatan penyuluhan hukum/ informasi hukum pada website dan aplikasi akses penyuluhan dna bantuan hukum</p> <p>4. Publikasi informasi hukum pada social media</p>	<p>B09:</p> <p>1. Gambar Hasil Produksi yang sudah di Edit</p> <p>2. Foto Kegiatan Produksi Kanal Hukum dan screen shot publikasi hasil rekaman di website penyuluhan hukum</p> <p>3. Screen shot jumlah berita yang dipublikasikan</p> <p>4. Screen shot statistic pengunjung di social media</p>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				<p>penyuluhan dan bantuan hukum</p> <p>5. Perekaman audio Kanal Hukum bekerjasama dengan Kanal KPK sebanyak 8 materi</p>		
				<p>B12:</p> <p>1. Penggandaan Hasil Final Film dan pendistribusian DVD Film Pendek dan Film</p> <p>2. Publikasi berita kegiatan penyuluhan hukum/ informasi hukum pada website dan aplikasi akses penyuluhan dna bantuan hukum</p> <p>3. Publikasi informasi hukum pada social media penyuluhan dan bantuan hukum</p> <p>4. Perekaman audio Kanal Hukum bekerjasama dengan Kanal KPK sebanyak 8 materi</p>	<p>B12:</p> <p>1. Dvd Film Pendek dan Film Dokumenter Penyuluhan dan Bantuan Hukum</p> <p>2. Foto Kegiatan Produksi Kanal Hukum dan screen shot publikasi hasil rekaman di website penyuluhan hukum</p> <p>3. Screen shot jumlah berita yang dipublikasikan</p> <p>4. Screen shot statistic pengunjung di social media</p>	
42.	Meningkatnya Kesadaran hukum masyarakat melalui Pembentukan	Terlaksananya ke-giatan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Peresmian	Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 25 Desa/Kelurahan di Tahun 2019	<p>B03:</p> <p>1. Terselenggaranya rapat koordi-nasi kegiatan Penyuluhan bersama Eselon II dan Instansi lainnya.</p>	<p>B03:</p> <p>Notulensi dan Absensi Rapat serta dokumentasi</p>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
	Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Desa/ Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2019		2. Terselenggaranya rapat persiapan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Pusat bersama Eselon II dan diluar BPHN		
				B06: 1. Terselenggaranya kegiatan Temu Sadar Hukum pada Kelompok Kadar-kum; 2. Terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan Penyuluhan bersama Eselon II dan Instansi lainnya. 3. Terselenggaranya rapat persiapan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Pusat bersama Eselon II dan diluar BPHN	B06: Notulensi dan Absensi Rapat serta doku-mentasi	
				B09: 1. Terselenggaranya Lomba Kadarkum Tingkat Pusat 2. Terselenggaranya kegiatan Temu Sadar Hukum 3. Terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan Penyuluhan bersama Eselon II dan Instansi lainnya	B09: Notulensi dan Absensi Rapat serta dokumentasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				4. Terselenggaranya kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di 6 wilayah		
				B12: Terselenggaranya kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di 7 wilayah	B12: Notulensi dan absensi Rapat serta dokumentasi	
43.	Monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi prakarsa Pemerintah, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres), yang tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Progsun PP dan Progsun Perpres	Terpantaunya perkembangan penyusunan RUU khususnya yang menjadi prakarsa Pemerintah, RPP, dan RPerpres, yang tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2019	1. Meningkatnya peran serta kementerian/LPNK dalam melakukan pelaporan pembentukan RUU, RPP, dan RPerpres, 2. Data mutakhir perkembangan pembahasan RUU yang menjadi prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun2019, RPP, dan RPerpres yang tercantum dalam daftar Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2019 RPP/RPerpres:	B03: Tersedianya data perkembangan penyusunan dan pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019 khususnya yang menjadi prakarsa Pemerintah, dan data RPP, RPerpres yang tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2019	B03: Rekapitulasi hasil pelaporan K/L pemrakarsa dengan kriteria terget capaian RUU: 1. Tersampainya draft RUU & Naskah Akademik kepada Presiden; 2. Tersampainya Surat Presiden kepada DPR.	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
	Progsun Perpres Tahun 2019.		3. Tersedianya draft awal RPP/Rperpres Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian (PAK);			
				B06: Tersedianya data perkembangan penyusunan dan pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019, khususnya yang menjadi prakarsa Pemerintah, dan data RPP, RPerpres yang tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2019	B06: Rekapitulasi hasil pelaporan K/L pemrakarsa dengan kriteria terget capaian  RUU: Tersedianya laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR  RPP/RPerpres: Proses pengusulan RPP/RPerpres melalui rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Nonkementerian;	
				B09:  Tersedianya data perkembangan penyusunan dan pembahasan	B09:  Rekapitulasi hasil pelaporan K/L sebagai	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				RUU khususnya yang menjadi prakarsa Pemerintah, dan data RPP, RPerpres yang tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2019	<p>pemrakarsa dengan kriteria terget capaian</p> <p>RUU:</p> <p>Tersedianya laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR</p> <p>RPP/RPerpres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft RPP/RPerpres hasil Panitia Antarkementerian dan/atau Nonkementerian (PAK)</li> <li>2. Tersampainya Surat Permohonan Harmonisasi ke Menteri Hukum dan HAM</li> </ol> <p>Tersedianya laporan perkembangan proses harmonisasi RPP/RPerpres</p>	
				B12: Tersedianya data perkembangan penyusunan RUU khususnya yang menjadi prakarsa	B12: Rekapitulasi hasil pelaporan K/L	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Pemerintah, dan data RPP, RPerpres yang tercantum dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2019	<p>pemrakarsa dengan kriteria terget capaian</p> <p>RUU:</p> <p>Tersedianya laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR,yang meliputi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sudah disahkan dalam Rapat Paripurna</li> <li>2. masih dalam pembahasan</li> </ol> <p>RPP/RPerpres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselesaikannya pembahasan draft RPP/RPerpres di Harmonisasi</li> <li>2. Tersampainya RPP/RPerpres kepada Presiden</li> <li>3. Sudah ditetapkan menjadi PP/Perpres</li> </ol>	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
44.	Pelaksanaan e-reporting JDIH	Terlaksanya pelaporan melalui aplikasi e-reporting JDIH	Termanfaatkanya aplikasi e-reporting JDIH	B03: Tersosialisasikan nya penggunaan aplikasi e-reporting JDIH	B03: Surat Edaran Kepala BPHN	
				B09: Terisinya aplikasi reporting JDIH	B09: Rekapitulasi anggota JDIH yang mengisi aplikasi e-reporting JDIH	
				B12: Tersusunnya laporan pemanfaatan aplikasi e-reporting JDIH	B12: Evaluasi anggota JDIH yang belum mengisi aplikasi e-reporting JDIH	
45.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website JDIH dan Pengintegrasian Website Anggota JDIH Dengan Website Pusat JDIHN	Terselenggaranya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website dan Pengintegrasian Website Anggota JDIH Dengan Website Pusat JDIHN	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan website anggota JDIH 2. Terintegrasikan nya website Anggota JDIH dengan website Pusat JDIHN	B03:  1. Rencana pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di 1 (satu) Provinsi	B03:  1. Jadwal pelaksanaan kegiatan 2. Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B06: Pelaksanaan Bimbingan Teknis di 2 (dua) Provinsi	B06: Laporan pelaksanaan kegiatan	
				B09: Pelaksanaan Bimbingan Teknis di 2 (dua) Provinsi	B09: Laporan pelaksanaan kegiatan	



<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B12: Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan Bimbingan Teknis di 2 (dua) Provinsi	B12: Laporan Akhir	
46.	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Tersusunnya 12 dokumen hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan dalam rangka memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan	B03: 1. Tersusunnya hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai objek analisis dan evaluasi hukum 2. Tersusunnya hasil inventarisasi awal permasalahan peraturan perundang-undangan	B03: 1. SK pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Daftar peraturan perundang-undangan hasil inventarisasi 3. Daftar masalah sementara peraturan perundang-undangan objek analisis dan evaluasi hukum	
				B06: 1. Terlaksananya kegiatan analisis dan evaluasi hukum menggunakan pedoman analisis dan evaluasi hukum 2. Terlaksananya FGD (Di Jakarta dan Daerah) guna mendukung pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum	B06: 1. Laporan perkembangan kelompok kerja analisis dan evaluasi hukum 2. Laporan pelaksanaan FGD	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				3. Terlaksananya pertemuan dengan Narasumber dan Pakar Hukum yang menunjang pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum	3. Laporan hasil rapat narasumber dan pakar	
				B09: Penetapan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	B09: Laporan hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi	
				B12: Tersusunnya laporan akhir rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum	B12: Buku Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum	
<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM</b>						
47.	Penelitian hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Rekomendasi hasil penelitian hukum	Rekomendasi hasil penelitian	B03: Tersusunnya desain (proposal) dan instrumen penelitian	B03: 1. Desain penelitian 2. Instrumen penelitian	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM</b>
				B06: 1. Pelaksanaan Pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data lapangan 3. Tersusunnya laporan penelitian	B06: 1. Data lapangan 2. Laporan Pengolahan dan analisis data (Laporan Antara)	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
					3. Laporan hasil penelitian (Laporan Akhir)	
				B09: Tersusunnya rekomendasi kebijakan	B09: rekomendasi kebijakan	
				B12: 1. rekomendasi hasil penelitian hukum 2. Evaluasi pemanfaatan hasil penelitian hukum	B12: 1. Bukti penyampaian rekomendasi hasil penelitian 2. laporan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian hukum	
48.	Penelitian HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Rekomendasi hasil penelitian HAM	Rekomendasi hasil penelitian	B03: Tersusunnya desain (proposal) dan instrumen penelitian	B03: 1. Desain penelitian 2. Instrumen penelitian	
				B06: 1. Pelaksanaan Pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisis data lapangan 3. Tersusunnya laporan penelitian	B06: 1. Data lapangan 2. Laporan Pengolahan dan analisis data (Laporan Antara) 3. Laporan hasil penelitian (Laporan Akhir)	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Tersusunnya rekomendasi kebijakan	B09: rekomendasi kebijakan	
				B12: 1. Rekomendasi hasil penelitian HAM 2. Evaluasi pemanfaatan hasil penelitian HAM	B12: 1. Bukti penyampaian rekomendasi hasil penelitian 2. laporan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian HAM	
49.	Kajian Kualitas Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas pelayanan publik dan integritas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: 1. Tersusunnya desain dan instrumen kajian survey IKM dan IPK 2. Pelaksanaan Pengumpulan data lapangan survey IKM dan IPK 3. Pengolahan dan analisis data lapangan hasil survey IKM dan IPK	B03: 1. Desain penelitian 2. Instrumen penelitian 3. Data lapangan 4. Laporan Pengolahan dan analisis data (Laporan Antara)	
				B06: 1. Tersusunnya Laporan hasil survei IPK dan IKM 2. Tersusunnya rekomendasi perbaikan kualitas layanan publik Kemenkumham 3. Penyampaian Laporan hasil penilaian IPK dan IKM serta rekomendasi perbaikan kualitas layanan publik	B06: 1. Laporan hasil survey IPK dan IKM 2. Rekomendasi perbaikan kualitas layanan publik Kemenkumham 3. Bukti penyampaian rekomendasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Kemenkumham kepada stakeholders		
				B09: Pemantauan tindaklanjut terhadap surat rekomendasi hasil kajian	B09: Laporan pemantauan	
				B12: Evaluasi pemanfaatan hasil kajian	B12: Laporan evaluasi pemanfaatan hasil survey IKM dan IPK	
50.	Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Hasil karya tulis ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	B03:  1. Tersusunnya SK Tim Jurnal Elektronik 2. Terpublikasi 7 karya tulis ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	B03:  1. SK Tim Pengelola Jurnal 2. Capture publikasi KTI yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional sebanyak 7 KTI jurnal internal	
				B06:  Terpublikasi 5 karya tulis ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional	B06:  Capture publikasi KTI yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional sebanyak 4 KTI	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					jurnal internal dan 1 (satu) KTI jurnal eksternal	
				B09: Terpublikasi 13 karya tulis ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional	B09: Capture publikasi KTI yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional sebanyak 10 KTI jurnal internal dan 3 (tiga) KTI jurnal eksternal	
				B12: 1. Terpublikasi 13 karya tulis ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional 2. Monitoring dan evaluasi	B12: 1. Capture publikasi KTI yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional sebanyak 10 KTI jurnal internal dan 3 (tiga) KTI jurnal eksternal. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM</b>						
51.	Penyelenggaraan Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (9 Angkatan)	Terselenggaranya Diklat SPPA (9 Angkatan)	Meningkatnya Pemahaman peran Aparat Penegak Hukum dan Instansi lainnya dalam Penanganan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	B03: Persiapan Pelaksanaan Diklat SPPA	B03: Notulen Rapat Persiapan Penyelenggaraan Diklat SPPA dan Dokumentasi Rapat Persiapan Diklat SPPA	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM</b>
				B06: Pelaksanaan Diklat PPA Angkatan I s/d III	B06: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan I s/d III beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat	
				B09: Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan IV s/d VI	B09: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan IV s/d VI beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat	

<b>NO.</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KRITERIA KEBERHASILAN</b>	<b>UKURAN KEBERHASILAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
				B12: Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan VII s/d IX	B12: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan VII s/d IX beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat	
52.	Penyelenggaraan Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) bagi 2.000 CPNS Kemenkumham	Terselenggaranya Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) bagi 2.000 CPNS Kemenkumham	2.000 Orang meningkat kompetensinya pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III Tahun 2019	B03: Persiapan Pelaksanaan Diklat TOF Latsar CPNS	B03: Notulen Rapat Persiapan Penyelenggaraan Diklat TOF dan Dokumentasi Rapat Persiapan Diklat TOF	
				B06: Pelaksanaan Diklat TOF Latsar CPNS (Pelaksanaan di BPSDM)	B06: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat TOF Latsar CPNS beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat	
				B09: Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) bagi 2.000 CPNS Kemenkumham	B09: Dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Latsar CPNS	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Evaluasi Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) bagi 2.000 CPNS Kemenkumham	B12: Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Latsar CPNS	
53.	Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Peserta Diklat Calon Pembimbing Kemasyarakatan Lulus sesuai standar penilaian;</li> <li>2. Alumni Diklat Pembimbing Kemasyarakatan yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Pertama</li> </ol>	Terselenggaranya Diklat Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan jadwal diklat pada Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM	B03: Pelaksanaan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I s/d IV	B03: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I s/d IV	
				B06: Pelaksanaan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan V s/d X	B06: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan V s/d X	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XI s/d XV	B09: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XI s/d XV	
				B12: Pelaksanaan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XVI s/d XVIII	B12: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XVI s/d XVIII	
54.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Assessment	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Assessment Center Bagi Pejabat Eselon IV dan V di 10 Kanwil</li> <li>2. Terselenggaranya Assessment Center Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol>	Tersedianya profil Kompetensi Pegawai	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Assessment</li> <li>2. Persiapan Assessment Center Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>3. Persiapan Assessment Center Bagi Jabatan</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulen Rapat</li> <li>2. Daftar Hadir Rapat</li> <li>3. SK Narasumber dan Moderator</li> <li>4. SK Peserta</li> <li>5. SK Penyelenggaraan Jadwal Kegiatan</li> <li>6. Surat Pemanggilan Peserta</li> </ol>	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		3. Terselenggaranya Assessment Center Bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4. Terselenggaranya Penilaian Kompetensi Peserta Diklat 5. Terselenggaranya Uji Kompetensi Metode CAT di 5 Kanwil		Fungsional dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4. Persiapan Penilaian Kompetensi Peserta Diklat 5. Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Metode CAT di 5 Kanwil	7. Surat Perintah	
				B06: 1. Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat Eselon IV dan V di 10 Kanwil 2. Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B06: 1. Dokumentasi 2. Laporan Hasil Assessment 3. Daftar Hadir Peserta	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: 1. Pelaksanaan Assessment Center Bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Peserta Diklat	B09: 1. Dokumentasi 2. Laporan Hasil Assessment 3. Daftar Hadir Peserta	
				B12: Pelaksanaan Uji Kompetensi Metode CAT di 5 Kanwil	B12: 1. Dokumentasi 2. Laporan Hasil Assessment 3. Daftar Hadir Peserta 4. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan	
55.	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan dibidang Ilmu Pemasarakatan	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan bagi Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1. Terbayarnya honorarium dosen tidak tetap dan penyelenggara pendidikan serta honorarium Pelatih 2. Terlaksananya kegiatan seminar, kegiatan ORLAP, PKI, KKN , Kegiatan	B03: 1. Pembuatan SK Dosen Tidak Tetap, Pelatih dan SK penyelenggaraan pendidikan 2. Pembayaran Dosen Tidak Tetap pelatih dan Penyelenggara Pendidikan 3. Pembayaran Uang saku Taruna 4. Pemberian Makan Taruna	B03: 1. SK Dosen tidak Tetap, Pelatih dan peyelnggara Pendidikan 2. Tanda Terima Honor 3. Tanda Terima Uang saku Taruna 4. Dokumen kontrak makan dan Berita	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			Masa Basis , dan kegiatan pelatihan menembak 3. Terbayarnya uang saku taruna 4. Diberikannya pakaian dinas kepada taruna, buku tulis dan lembar jawab ujian kepada taruna serta makan taruna	5. Pemberian buku Taruna	acara Penerimaan Makan 5. Tanda Terima Pemberian Buku 6. Dokumen kontrak pengadaan Pakaian Dinas Taruna 7. Tanda Terima Honor 8. Tanda Terima Uang saku Taruna	
				B06: 1. Pelaksanaan Seminar dll dan Pelaksanaan ORLAP, PKI dan KKN 2. Pembayaran Dosen Tidak Tetap pelatih dan Penyelenggara Pendidikan 3. Pembayaran Uang saku Taruna 4. Pemberian Makan Taruna 5. Pengadaan Pakaian dinas taruna dan buku tulis taruna	B06: 1. Dokumen kontrak makan dan Berita acara Penerimaan Makan 2. Tanda Terima Pemberian Buku dan Pakaian Dinas Taruna 3. Tanda Terima Honor 4. Tanda Terima Uang saku Taruna 5. Dokumen kontrak pelatihan Menembak	
				B09: 1. Pelatihan Menembak dan Masa Basis 54	B09: 1. Dokumen kontrak makan dan Berita	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				2. Pembayaran Dosen Tidak Tetap pelatih dan Penyelenggara Pendidikan 3. Pembayaran Uang saku Taruna	acara Penerimaan Makan 2. Dokument kontrak pelatihan menembak dan Masa Basis 3. Dokumen kontrak makan dan Berita acara Penerimaan Makan 4. Tanda Terima Pemberian Buku dan Pakaian Dinas Taruna 5. Tanda Terima Honor 6. Tanda Terima Uang saku Taruna	
				B12: 1. Pembayaran Dosen Tidak Tetap pelatih dan Penyelenggara Pendidikan 2. Pembayaran Uang saku Taruna 3. Pemberian Makan Taruna	B12: 1. Dokumen Berita acara Penerimaan Makan 2. Tanda Terima Honor 3. Tanda Terima Uang saku Taruna 4. Dokumen kontrak pelatihan Menembak	
56.	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian	1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur	B03: Persiapan Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian	B03: Laporan dan Dokumentasi Rapat Persiapan	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
	Didik Keimigrasian		Kementerian Hukum dan HAM 2. Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian 3. Meningkatnya Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di bidang Hukum dan HAM Yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu		Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian	
				B06: Pelaksanaan Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian	B06: Hasil kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian beserta SK Pengejar dan SK Peserta Didik Keimigrasian	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat	B09: Laporan kegiatan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat	
				B12: Tercapainya Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian	B12: Hasil Evaluasi kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan Pendidikan Kedinasan Lulusan Peserta Didik Keimigrasian	
57.	Penyelenggaraan Diklat pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Meningkatnya Kompetensi Aparatur dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B06: 1. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Kepala Regu dan Petugas Pintu Utama pada Lapas dan Rutan serta Pelatihan Dasar-Dasar HAM bagi Petugas PAS dan Imigrasi 2. Pelaksanaan Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) Metode E-Learning dan Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Metode E-Learning	B06: 1. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Kepala Regu dan Petugas Pintu Utama pada Lapas dan Rutan serta Pelatihan Dasar-Dasar HAM bagi Petugas PAS dan Imigrasi 2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Muatan	



NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					Teknis Substantif Lembaga (MTSL) Metode E-Learning dan Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Metode E-Learning	
				B12: 1. Pelaksanaan Pelatihan Pengawasan Orang Asing dan Pelatihan Bendaharawan 2. Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik TK Dasar Metode E-Learning dan Pelatihan Pengelolaan BMN Metode E-Learning	B12: 1. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pengawasan Orang Asing dan Pelatihan Bendaharawan 2. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Publik Tk.Dasar Metode E-Learning dan Pelatihan Pengelolaan BMN Metode E-Learning.	
58.	Penyusunan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	B03 1. Pembuatan SK Tim 2. Data dukung Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS	B03 : 1. SK Tim 2. Hasil kajian Balitbangkumham dan referensi lainnya	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Kementerian Hukum dan HAM 3. FGD Penyusunan Draft Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM 4. Studi Banding	3. Draft Awal Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM 4. Hasil Benchmark	
				B06 : Konsinyering Draft Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	B06 : Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	
				B09 : Finalisasi Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	B09 : Hasil finalisasi Rancangan Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS Kementerian Hukum dan HAM	
				B12 : Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Grand Design Pengembangan Kompetensi	B12: Rancangan Permenkumham tentang Grand Design Pengembangan Kompetensi PNS	

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				PNS Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA,



YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR M.HH-11.PR.01.03 TAHUN 2018

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019**

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>						
1.	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah	Terlaksananya seluruh tugas dan fungsi serta target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah yang ditetapkan secara tepat waktu dan berkualitas	Seluruh tugas dan fungsi serta target kinerja dilaksanakan secara tepat waktu dengan data dan kegiatan yang berkualitas	B03: Rapat kerja pembinaan pengawasan dan pengendalian seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah	B03: Laporan pelaksanaan rapat kerja dan dokumentasi	<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>
				B06: Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi serta target kinerja di lingkungan kantor wilayah	B06: Laporan dan dokumentasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi serta target kinerja di lingkungan kantor wilayah	B09: Laporan dan dokumentasi	
				B12: Monitoring dan evaluasi	B12: Laporan dan dokumentasi	
2.	Penguatan Koordinasi dengan Instansi terkait di Kantor Wilayah	Koordinasi Kantor Wilayah dengan Instansi terkait bidang Hukum dan HAM dilaksanakan mulai dari tingkat wilayah dan UPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya koordinasi dengan forum, Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM Dilkumjakpol plus sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah</li> <li>2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi di tingkat Wilayah dan UPT</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas SDM</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat dalam rangka koordinasi dengan biro hukum pemprov dan bagian hukum kabupaten/kota</li> <li>2. Terlaksananya rapat dalam rangka koordinasi di tingkat wilayah dan UPT</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan rapat koordinasi</li> <li>2. Laporan rapat dalam koordinasi di tingkat Wilayah</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Terlaksananya rapat dalam rangka pelaksanaan Dilkumjakpol plus di tingkat wilayah	B06: Laporan pelaksanaan rapat Dilkumjakpol plus	
				B09: Meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi (K3) jajaran Kanwil Kumham dengan Dilkumjakpol plus	B09: Laporan dan dokumentasi	
				B12: Terimplementasinya dan Terlaksananya kesepakatan bersama Dilkumjakpol plus	B12: Laporan hasil evaluasi dan Rekomendasi	
3.	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal	Terlaksananya SPIP terkait dengan 1. Peningkatan pelayanan publik 2. Pencegahan korupsi	Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi) satker di kantor wilayah (penilaian oleh APIP)	B03: 1. Pembentukan satgas SPIP di wilayah dan UPT 2. Mitigasi risiko	B03: 1. SK Tim Satgas SPIP 2. Dokumen mitigasi risiko	
				B06: Pelaksanaan pengendalian kegiatan	B06: Laporan pengendalian kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Terlaksananya informasi dan komunikasi	B09: Laporan internalisasi dan sosialisasi seluruh jajaran kanwil dan UPT	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan SPIP	
4.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terwujudnya WBK/WBBM di KemenkumHAM	Meningkatnya jumlah satuan kerja berpredikat WBK/WBBM	B06: 1. Penguatan dan pedampingan satker yang telah diusulkan dengan melengkapi dokumen dan saptas pendukung 2. Pembinaan dan pedampingan satker yang masuk dalam daftar pembinaan	B06: Laporan hasil pendampingan	
				B09: 1. Penguatan dan pedampingan satker yang telah diusulkan melalui uji coba penilaian eksternal 2. Mengidentifikasi satker yang telah dilakukan pembinaan dan pedampingan menjadi satker yang akan diusulkan wbk/wbbm	B09: Laporan hasil pendampingan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				3. Pembinaan dan pendampingan satker yang masuk dalam daftar pembinaan		
				B12: 1. Penguatan satker yang telah diusulkan melalui tindak lanjut evaluasi KeMenpan 2. Mengidentifikasi satker yang telah dilakukan pembinaan dan pendampingan menjadi satker yang akan diusulkan WBK/WBBM 3. Pembinaan dan pendampingan satker yang masuk dalam daftar pembinaan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBK/WBBM di wilayah	B12: 1. Laporan hasil pembinaan dan pendampingan satker yang masuk dalam daftar pembinaan 2. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBK/WBBM di Wilayah	
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>						
5.	e-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	Optimalisasi Penanganan e-LAPOR	Tersampainya respon atas laporan pengaduan dengan kategori laporan ringan (maksimal 7 hari kerja), kategori laporan sedang (maksimal 14 hari kerja) dan kategori laporan berat (maksimal 30 hari Kerja).	B03: 1. identifikasi aduan 2. percepatan penanganan pengaduan dalam e-LAPOR	B03: 1. Laporan identifikasi pengaduan 2. Surat kepala kantor wilayah kepada Kepala Satuan kerja untuk mempercepat penanganan pengaduan	<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: 1. identifikasi aduan 2. percepatan penanganan pengaduan dalam e- LAPOR	B06: 1. Laporan Identifikasi aduan 2. Laporan perkembangan tindak lanjut aduan	
				B09: 1. identifikasi aduan 2. percepatan penanganan pengaduan dalam e- LAPOR	B09: 1. Laporan Identifikasi aduan 2. Laporan perkembangan tindak lanjut aduan	
				B12: 1. identifikasi aduan 2. percepatan penanganan pengaduan dalam e- LAPOR 3. monitoring dan evaluasi	B12: 1. Laporan Identifikasi aduan 2. Laporan dan evaluasi	
6.	Implementasi Administrasi disiplin penegakan disiplin berbasis e-government melalui Simpeg	Data Catatan disiplin pegawai yang up to date secara real time	Terekamnya data disiplin pegawai dan riwayat proses disiplin pegawai secara real time di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam Simpeg	B03: Terimplementasinya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia Bagian Barat	B03: 1. capture surat panggilan 2. SK TIM Pemeriksa 3. SK Hukdis dari Simpeg	
				B06: Terimplementasinya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum	B06: 1. capture surat panggilan 2. SK TIM Pemeriksa	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				dan HAM di Indonesia Bagian Barat dan Tengah	3. SK Hukdis dari Simpeg	
				B09: Terimplementasinya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur	B09: 1. capture surat panggilan 2. SK TIM Pemeriksa 3. SK Hukdis dari Simpeg	
				B12: Tidak ada lagi administrasi penegakan disiplin yang diterbitkan secara manual seluruh sudah berbasis Simpeg	B12: 1. capture surat panggilan 2. SK TIM Pemeriksa 3. SK Hukdis dari Simpeg	
7.	Penguatan Kapasitas SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Metode E-Learning	a. Mewujudkan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham yang profesional dalam bidang dasar-dasar HAM	Sekurang-kurangnya 10 orang pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham meningkatkan pengetahuannya setelah mengikuti diklat Metode E-Learning Dasar-dasar HAM	B03: 1. Menunjuk Koordinator Diklat pada Kantor Wilayah sebagai admin diklat Metode E-Learning Dasar-dasar HAM 2. Mengusulkan sekurang-kurangnya 10 nama calon peserta diklat Metode e-learning Dasar-Dasar HAM	B03: 1. Daftar usulan admin diklat metode e-learning Kantor Wilayah 2. Daftar nama usulan calon peserta diklat metode e-learning dilingkungan Kantor Wilayah	
				B06: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Dasar-Dasar HAM	B06: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				angkatan I dan II oleh Koordinator di Wilayah	<p>Metode E-Learn Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Dasar-Dasar HAM Angkatan I dan II</p> <p>2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E- learning Dasar-dasar HAM Angkatan I dan II</p>	
				B09: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E- Learning Dasar-Dasar HAM angkatan III, IV dan V oleh Koordinator di Wilayah	<p>B09:</p> <p>1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Dasar-Dasar HAM Angkatan III, IV dan V</p> <p>2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					Diklat Metode E-learning Dasar-dasar HAM Angkatan III, IV dan V	
				B12: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Dasar-Dasar HAM angkatan VI, VII dan VIII oleh Koordinator di Wilayah dan pelaporan pelaksanaan diklat Metode E-Learning Dasar-Dasar HAM oleh Koordinator Kantor Wilayah	B12: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Dasar-Dasar HAM Angkatan VI, VII dan VIII 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Dasar-dasar HAM Angkatan VI, VII dan VIII 3. Laporan pelaksanaan Diklat Metode E-Learning oleh Koordinator Kantor Wilayah	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		b. Mewujudkan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham yang professional dalam bidang Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Sekurang-kurangnya 2 orang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham meningkat pengetahuannya setelah mengikuti diklat Metode E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	B03: Menunjuk Koordinator Diklat pada Kantor Wilayah sebagai admin diklat Metode E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Mengusulkan sekurang-kurangnya 2 nama calon peserta diklat Metode e-learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan	B03: Daftar usulan admin diklat Metode e-learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dilingkungan Kantor Wilayah Daftar nama usulan calon peserta diklat metode e-learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah	
				B06: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan angkatan I oleh Koordinator di Wilayah	B06: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan I 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan I	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				<p>B09:            Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan angkatan II oleh Koordinator di Wilayah</p>	<p>B09:            1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan II            2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan II</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Pelaporan pelaksanaan diklat Metode E-Learning Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan I dan II oleh Koordinator Kantor Wilayah	B12: Laporan pelaksanaan Diklat Metode E-Learning oleh Koordinator Kantor Wilayah	
		c. Mewujudkan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham yang professional dalam bidang Pengelolaan BMN	Sekurang-kurangnya 10 orang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham meningkat pengetahuannya setelah mengikuti diklat Metode E-Learning Pengelolaan BMN	B03: 1. Menunjuk Koordinator Diklat pada Kantor Wilayah sebagai admin diklat Metode E-Learning Pengelolaan BMN 2. Mengusulkan sekurang-kurangnya 10 nama calon peserta diklat Metode e-learning Pengelolaan BMN	B03: 1. Daftar usulan admin diklat Metode e-learning Pengelolaan BMN dilingkungan Kantor Wilayah 2. Daftar nama usulan calon peserta diklat metode e-learning Pengelolaan BMN dilingkungan Kantor Wilayah	
				B06: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat Metode E-Learning Pengelolaan BMN angkatan I dan II oleh Koordinator di Wilayah	B06: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Pengelolaan BMN Angkatan I dan II 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Pengelolaan BMN Angkatan I dan II	
				B09: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Pengelolaan BMN angkatan III, IV dan V oleh Koordinator di Wilayah	B09: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Pengelolaan BMN Angkatan III dan IV 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Pengelolaan BMN Angkatan III dan IV	
				B12: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Pengelolaan BMN angkatan V dan VI oleh Koordinator di Wilayah dan pelaporan pelaksanaan diklat Metode E-Learning Pengelolaan	B12: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Pengelolaan BMN Angkatan V dan VI 2. Capture login dan capture kegiatan	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				BMN oleh Koordinator Kantor Wilayah	<p>Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Pengelolaan BMN Angkatan V dan VI</p> <p>3. Laporan pelaksanaan Diklat Metode E-Learning oleh Koordinator Kantor Wilayah</p>	
		d. Mewujudkan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham yang professional dalam bidang MTSL	Sekurang-kurangnya 10 orang pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham meningkat pengetahuannya setelah mengikuti diklat Metode E-Learning MTSL	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Koordinator Diklat pada Kantor Wilayah sebagai admin diklat Metode E-Learning MTSL</li> <li>2. Mengusulkan sekurang-kurangnya 10 nama calon peserta diklat Metode e-Learning MTSL</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar usulan admin diklat Metode e-learning MTSL dilingkungan Kantor Wilayah</li> <li>2. Daftar nama usulan calon peserta diklat metode e-learning MTSL dilingkungan Kantor Wilayah</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <p>Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat Metode E-Learning MTSL angkatan I dan II oleh Koordinator di Wilayah</p>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning MTSL Angkatan I dan II</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning MTSL Angkatan I dan II	
				B09: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning MTSL angkatan III dan IV oleh Koordinator di Wilayah	B09: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning MTSL Angkatan III dan IV 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning MTSL Angkatan III dan IV	
				B12: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning MTSL angkatan V oleh Koordinator di Wilayah dan pelaporan pelaksanaan diklat	B12: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning MTSL Angkatan V	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				Metode E-Learning MTSL oleh Koordinator Kantor Wilayah	2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning MTSL Angkatan V 3. Laporan pelaksanaan Diklat Metode E-Learning oleh Koordinator Kantor Wilayah	
		e. Mewujudkan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham yang professional Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	Sekurang-kurangnya 10 orang pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham meningkat pengetahuannya setelah mengikuti diklat Metode E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	B03: Menunjuk Koordinator Diklat pada Kantor Wilayah sebagai admin diklat Metode E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Mengusulkan sekurang-kurangnya 10 nama calon peserta diklat Metode e-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	B03: Daftar usulan admin diklat Metode e-learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar dilingkungan Kantor Wilayah Daftar nama usulan calon peserta diklat metode e-learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar di lingkungan Kantor Wilayah	
				B06: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar angkatan	B06: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Administrasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				I dan II oleh Koordinator di Wilayah	Perkantoran Tk. Dasar Angkatan I dan II 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Angkatan I dan II	
				B09: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar angkatan III, IV dan V oleh Koordinator di Wilayah	B09: Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Angkatan III, IV dan V	
				B12: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar angkatan VI oleh Koordinator di Wilayah dan pelaporan pelaksanaan diklat Metode E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar oleh Koordinator Kantor Wilayah	B12: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Angkatan VI. 2. Capture login dan capture kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					<p>Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Angkatan VI</p> <p>3. Laporan pelaksanaan Diklat Metode E-Learning oleh Koordinator Kantor Wilayah</p>	
		f. Mewujudkan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham yang professional Pelayanan Publik Tk. Dasar	Sekurang-kurangnya 10 orang pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham meningkat pengetahuannya setelah mengikuti diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar	B03: Menunjuk Koordinator Diklat pada Kantor Wilayah sebagai admin diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar Mengusulkan sekurang-kurangnya 10 nama calon peserta diklat Metode e-learning Pelayanan Publik Tk. Dasar	B03: Daftar usulan admin diklat Metode e-learning Pelayanan Publik Tk. Dasar dilingkungan Kantor Wilayah Daftar nama usulan calon peserta diklat metode e-learning Pelayanan Publik Tk. Dasar di lingkungan Kantor Wilayah	
				B06: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar angkatan I dan II oleh Koordinator di Wilayah	B06: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar Angkatan I dan II	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar Angkatan I dan II	
				B09: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar angkatan III, IV dan V oleh Koordinator di Wilayah	B09: Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar Angkatan III, IV dan V	
				B12: Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar angkatan VI oleh Koordinator di Wilayah dan pelaporan pelaksanaan diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar oleh Koordinator Kantor Wilayah	B12: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Pelayanan Publik Tk. Dasar Angkatan VI. 2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Pelayanan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					Publik Tk. Dasar Angkatan VI. 3. Laporan pelaksanaan Diklat Metode E-Learning oleh Koordinator Kantor Wilayah	
		g. Terwujudnya pegawai dilingkungan Kemenkumham yang professional dalam bidang Reformasi Birokrasi	17.513 orang CPNS dilingkungan Kemenkumham meningkat pengetahuannya setelah mengikuti Pelatihan Metode E-Learning Reformasi Birokrasi bagi	B03: 30% CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengikuti diklat Reformasi Birokrasi Metode e-Learning 2019	B03: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Reformasi Birokrasi  2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Reformasi Birokrasi	
				B06: 30% CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengikuti diklat Reformasi Birokrasi Metode e-Learning 2019	B06: 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode E-Learning Reformasi Birokrasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					2. Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Reformasi Birokrasi	
				<b>B09:</b> 20% CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengikuti diklat Reformasi Birokrasi Metode <i>e-Learning</i> 2019	<b>B09:</b> 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode <i>E-Learning</i> Reformasi Birokrasi  2. <i>Capture login</i> dan <i>capture</i> kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode <i>E-learning</i> Reformasi Birokrasi	
				<b>B12:</b> 20% CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengikuti diklat Reformasi Birokrasi Metode <i>e-Learning</i> 2019019	<b>B12:</b> 1. Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah untuk mengikuti diklat Metode <i>E-Learning</i> Reformasi Birokrasi	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					2. <i>Capture login dan capture kegiatan Peserta pada saat mengikuti kegiatan diskusi dan ujian Diklat Metode E-learning Reformasi Birokrasi</i>	
8.	Terlaksananya monitoring Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Terselesaikannya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	B03: 1. Rapat Persiapan proses pengadaan Barang dan Jasa 2. Penyusunan Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan I	B03: 1. Laporan hasil rapat persiapan 2. SK Tim pengadaan Barang dan Jasa 3. hasil Laporan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan I	
				B06: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan II	B06: Laporan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan II	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan III	B09: Laporan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan III	
				B12: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan IV	B12: Laporan monitoring dan evaluasi progres pengadaan barang dan jasa triwulan IV	
4.	Tindak Lanjut Temuan Itjen dan BPK	Percepatan tindak lanjut temuan Itjen dan BPK	Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan Itjen dan BPK	B03: Menurunnya nilai temuan yang harus dikembalikan ke kas negara	B03: Bukti penyetoran	
				B06: Menurunnya nilai temuan yang harus dikembalikan ke kas negara	B06: Bukti penyetoran	
				B09: Menurunnya nilai temuan yang harus dikembalikan ke kas negara	B09: Bukti penyetoran	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Menurunnya nilai temuan yang harus dikembalikan ke kas negara	B12: Bukti penyetoran	
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>						
5.	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota serta Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota.</li> <li>2. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda Prov/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD.</li> <li>2. 75% Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah.</li> </ol>	B03:  Terlaksananya kegiatan koordinasi Kanwil Kemenkumham dengan Pemda Prov/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD.	B03:  Laporan Koordinasi	<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: 25% Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah.	B06: Laporan (Surat permohonan pengharmonisasian dari Pemda ke Kanwil, SK Dirjen PP ttg Penunjukan Perancang PUU yang terlibat dalam pengharmonisasian, Notula, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dari Kanwil ke Pemda)	
				B09: 50% Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah	B09: Laporan (Surat permohonan pengharmonisasian dari Pemda ke Kanwil, SK Dirjen PP ttg Penunjukan Perancang PUU yang terlibat dalam pengharmonisasian, Notula, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dari Kanwil ke Pemda)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: 75% Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah	B12: Laporan (Surat permohonan pengharmonisasian dari Pemda ke Kanwil, SK Dirjen PP ttg Penunjukan Perancang PUU yang terlibat dalam pengharmonisasian, Notula, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dari Kanwil ke Pemda)	
6.	Pelaksanaan Kerja Tim Investigasi Evaluasi Notaris di Wilayah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Investigasi Notaris di Wilayah dalam rangka penegakan hukum di bidang Kenotariatan	Hasil Investigasi ditindaklanjuti oleh Menteri, Ditjen AHU, MPN, MPD, MPW	B03: Pembentukan Tim Investigasi Notaris di Wilayah	B03: SK Tim Investigasi	
				B06: Pemetaan Data Notaris Bermasalah di Wilayah	B06: Data Pemetaan Notaris bermasalah	
				B09: Investigasi Notaris di Wilayah	B09: Laporan hasil investigasi notaris	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Investigasi Notaris di Wilayah dan evaluasi	B12: Laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan kerja Tim Investigasi	
7.	Peningkatan PNBP AHU melalui penyebaran informasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Tersebarnya informasi mengenai layanan AHU kepada <i>stakeholders</i> di wilayah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan PNBP AHU	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi (sosialisasi / seminar / dll) mengenai Layanan AHU di wilayah	B03: Rapat Persiapan Awal	B03: Notulen Rapat	
				B06: Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi terkait Layanan AHU	B06: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
				B09: Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi terkait Layanan AHU	B09: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
				B12: Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi terkait Layanan AHU	B12: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
8.	Digitalisasi Arsip Fidusia di wilayah	Terlaksananya digitalisasi sertifikat jaminan fidusia di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia	Tersedianya Data Digital Sertifikat Jaminan Fidusia yang Ada di Kantor Wilayah	B03: Pembentukan SK Tim Pelaksanaan Digitalisasi Sertifikat Jaminan Fidusia	B03: SK Tim, Laporan Pelaksanaan Persiapan dan Data Inventarisasi Data Arsip Jaminan Fidusia	
				B06: 1. Persiapan Pelaksanaan Digitalisasi Sertifikat Jaminan Fidusia 2. Inventarisasi Data Arsip Jaminan Fidusia	B06: SK Tim, Laporan Pelaksanaan Persiapan dan Data Inventarisasi Data Arsip Jaminan Fidusia	
				B09: Persentase 30% Pelaksanaan Digitalisasi Arsip Sertifikat Jaminan Fidusia	B09: Laporan pelaksanaan digitalisasi data dan rekapitulasi data	
				B12: Persentase 20% Pelaksanaan Digitalisasi Arsip Sertifikat Jaminan Fidusia dan Evaluasi	B12: rekapitulasi data yang sudah dilakukan digitalisasi dan Laporan hasil Evaluasi pelaksanaan digitalisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
9.	Optimalisasi Pemahaman Desain Industri	Peningkatan Pemahaman Desain Industri di wilayah	Tersedianya Data Base Potensi Desain Industri di wilayah dan <i>action plan</i> diseminasi	B03: Koordinasi dengan DJKI terkait agen-agen diseminasi Kekayaan Intelektual di wilayah	B03: Laporan Koordinasi 1. screen capture surat tugas/perintah kegiatan 2. notula kegiatan 3. dokumentasi kegiatan	
				B06: Rapat persiapan Inventarisasi Potensi Desain Industri dengan pemangku kepentingan di wilayah	B06: Laporan rapat Inventarisasi Potensi Desain Industri dengan pemangku kepentingan di wilayah	
				B09 : Inventarisasi Potensi Desain Industri	B09 : Data Base Potensi Desain Industri	
				B12 : Penyusunan Action Plan Diseminasi Desain Industri di wilayah	B12 : Laporan Action Plan Diseminasi Desain Industri di wilayah	
10.	Optimalisasi Pendaftaran Indikasi Geografis	Terdapat Produk Indikasi Geografis Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di masing-masing Kantor Wilayah	Pengajuan permohonan minimal satu indikasi Geografis di wilayah	B03: Koordinasi dengan DJKI mengenai rencana tindak lanjut inventarisasi indikasi geografis pada tahun sebelumnya	B03: laporan koordinasi rencana tindak lanjut inventarisasi indikasi geografis pada tahun sebelumnya (daftar potensi IG yang akan ditindak lanjuti untuk	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					dimohonkan pendaftarannya dan laporan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan	
				B06 : Tindak Lanjut Inventarisasi Indikasi Geografis tahun sebelumnya oleh Kanwil dan stakeholder	B06 : Laporan Tindak Lanjut Inventarisasi Indikasi Geografis	
				B09 : draft deskripsi Indikasi geografis dari inventarisasi tahun sebelumnya	B09 : Draft Deskripsi Indikasi Geografis	
				B12 : Permohonan Indikasi geografis tiap kantor wilayah	B12 : Laporan permohonan pendaftaran IG dari tiap Kanwil	
11.	Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual	Meningkatnya Pelindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual	Pelaksanaan Kegiatan diseminasi Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	B03: Action Plan Pelaksanaan diseminasi Pelindungan Hukum di bidang kekayaan intelektual	B03: Laporan Action Plan Pelaksanaan Sosialisasi Pelindungan Hukum di bidang kekayaan intelektual	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06 : penyiapan materi diseminasi pelindungan hukum di bidang kekayaan intelektual	B06 : materi diseminasi pelindungan hukum di bidang kekayaan intelektual	
				B09 : Pelaksanaan diseminasi Pelindungan Hukum di bidang kekayaan intelektual	B09 : Laporan Pelaksanaan diseminasi Pelindungan Hukum di bidang kekayaan intelektual	
12.	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring serambi Kantor Staf Presiden <a href="https://serambi.ksp.go.id">https://serambi.ksp.go.id</a>	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem monitoring serambi Kantor Staf Presiden <a href="https://serambi.ksp.go.id">https://serambi.ksp.go.id</a>	Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi HAM	B03: Koordinasi dengan Pemda untuk melaporkan pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2019	B03: Surat koordinasi pelaksanaan pelaporan B03 Tahun 2019	
				B06: Koordinasi dengan Pemda untuk melaporkan capaian Aksi HAM per Juni 2019	B06: 1. Surat koordinasi pelaksanaan pelaporan B06 Tahun 2019 2. Laporan Capaian Aksi HAM Prov/Kab./Kota B03 Tahun 2019	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Koordinasi dengan Pemda untuk melaporkan capaian Aksi HAM per September 2019	B09: 1. Surat koordinasi pelaksanaan pelaporan B09 Tahun 2019 2. Laporan Capaian Aksi HAM Prov/Kab./Kota B06 Tahun 2019	
				B12: Koordinasi dengan Pemda untuk melaporkan capaian Aksi HAM per Desember 2019	B12: 1. Surat koordinasi pelaksanaan pelaporan B12 Tahun 2019 2. Laporan Capaian Aksi HAM Prov/Kab./Kota B12 Tahun 2019	
13.	Penilaian Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Terlaksananya penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	B03: Persiapan koordinasi pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	B03: Surat koordinasi pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM	
				B06: Koordinasi pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	B06: Surat Koordinasi ke daerah tentang notifikasi jadwal pelaksanaan penilaian Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					HAM ke Aplikasi KKP HAM ( <i>kkp.ham.go.id</i> )	
				B09: Pelaksanaan pemeriksaan dan pengunggahan data penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui sistem aplikasi penilaian KKP HAM	B09: Capture pengunggahan data penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui sistem aplikasi penilaian KKP HAM	
				B12: Evaluasi Penilaian Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	B12: Laporan Evaluasi	
14.	Penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM	Terlaksananya penelahaan dan koordinasi ke instansi terkait	Presentase penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang telah dikoordinasikan dengan stakeholder	B03: 25% dugaan pelanggran/permasalahan HAM yang telah dikoordinasikan dengan stakeholder	B03 – B12 Surat koordinasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang telah disampaikan stakeholder	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: 25% dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang telah dikoordinasikan dengan stakeholder		
				B09: 25% dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang telah dikoordinasikan dengan stakeholder		
				B12: 25% dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang telah dikoordinasikan dengan stakeholder		
15.	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas bagi OBH dan Paralegal	Meningkatnya Kapasitas OBH/ paralegal	Terlaksananya Pelatihan OBH dan paralega	B03: Persiapan Pelatihan OBH dan Paralegal	B03: 1. Daftar hadir peserta; dan 2. Notula rapat; dan 3. Dokumentasi	
				B06: Pelatihan OBH dan Paralegal	B06: 1. SK Panitia Pelaksana; 2. Daftar hadir peserta; dan 3. Laporan Kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					4. Dokumentasi	
				B09: Peningkatan Kualitas Paralegal	B09: 1. Data jumlah paralegal pada OBH di aplikasi sidbankum; dan 2. Laporan Kegiatan Pelatihan OBH dan Paralegal	
				B12: Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum	B12: 1. Data jumlah penerima bantuan hukum; dan 2. Laporan hasil e-monev OBH	
16.	Kajian Hukum dan HAM di wilayah dengan tema <b>“Pelindungan HAM/ Pembangunan Hukum”</b>	Tersedianya Rekomendasi hasil kajian	Rekomendasi hasil kajian yang disampaikan.	B03: 1. Tersusunnya SK Tim 2. Tersusunnya proposal Kajian 3. Terlaksananya presentasi proposal yang ditandatangani Kepala Balitbang Hukum dan HAM	B03: 1. SK Tim 2. Proposal kajian 3. Bukti Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Balitbang Hukum dan HAM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				4. Terlaksananya presentasi proposal	4. Notulen dan Foto dokumentasi presentasi	
				B06: 1. Pelaksanaan pengumpulan data lapangan 2. Pengolahan dan analisa data lapangan	B06: 1. Hasil data lapangan 2. Draft laporan hasil kajian	
				B09: 1. Presentasi draft laporan akhir. 2. Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM	B09: 1. Bahan presentasi draft laporan akhir 2. Laporan Akhir Kajian 3. Bukti	
				B12: Evaluasi hasil kajian	B12: Laporan evaluasi hasil kajian	
17.	Layanan Database Permasalahan Hukum dan HAM (Datamaskumham)	Tersedianya data permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada aplikasi Datamaskumham	Jumlah data permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terpublikasi pada aplikasi Datamaskumham	B03: 1. Terbitnya SK TIM 2. Tersusunnya daftar inventarisasi permasalahan hukum dan HAM di wilayah	B03: 1. SK Tim 2. Capture Daftar masalah yang di publikasikan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Tersusunnya daftar inventarisasi permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang di input dalam aplikasi Datamaskumham	B06: Capture Daftar masalah yang di publikasikan	
				B09: Tersusunnya daftar inventarisasi permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang di input dalam aplikasi Datamaskumham	B09: Capture Daftar masalah yang di publikasikan	
				B12: 1. Tersusunnya daftar inventarisasi permasalahan hukum dan HAM di wilayah yang di input dalam aplikasi Datamaskumham 2. Evaluasi pelaksanaan pengumpulan permasalahan hukum dan Hak asasi manusia	B12: 1. <i>Capture</i> Daftar masalah yang di publikasikan 2. Laporan evaluasi pelaksanaan pengumpulan permasalahan hukum dan Hak asasi manusia	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>						
18.	Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pelayanan program tahanan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum	B03 Kostek pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	B03 Laporan kostek pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>
				B06 Pelaksanaan penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	B06 Laporan Pelaksanaan penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	
				B09 Pelaksanaan penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	B09 Laporan Pelaksanaan penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	
				B12 Bintorwasdal	B12 Laporan Bintorwasdal	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			Asesmen dan klasifikasi penempatan bagi tahanan yang telah memiliki kekauatan hukum	B03: Usulan peserta pelatihan assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	B03: Data peserta pelatihan assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	
				B06: Melaksanakan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	B06: Laporan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	
				B09: Melaksanakan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	B09: Laporan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	
				B12: 1. Melaksanakan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan pada di wilayah 2. Evaluasi dan monitoring	B12: 1. Laporan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah. 2. Laporan Evaluasi dan Monitoring	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		Menurunnya jumlah overstaying dengan penerapan TI dan pertukaran data antar institusi penegak hukum pada 40 (empat puluh) UPT	Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien di wilayah	B03: Tersampainya SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	B03: Laporan Penyampaian SOP	
				B06 Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	B06: Laporan pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	
				B09 Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	B09 Laporan pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	
				B12 Bintorwasdal	B12 Laporan Bintorwasdal	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas program pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> di setiap wilayah</li> <li>2. Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan yang ditetapkan</li> <li>3. Terlaksananya Pemindahan Narapidana Resiko Tinggi (<i>high risk</i>)</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Lapas <i>maximum, medium, minimum</i></li> <li>2. Kostek bagi asesor</li> <li>3. Kostek Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan</li> <li>4. Usulan pemindahan Narapidana Resiko Tinggi (<i>high risk</i>)</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen usulan Lapas <i>maximum, medium, minimum</i></li> <li>2. Laporan Kostek bagi asesor</li> <li>3. Kostek Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan</li> <li>4. Dokumen Usulan pemindahan Narapidana Resiko Tinggi (<i>high risk</i>)</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i></li> <li>2. Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasarakatan yang ditetapkan</li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i></li> <li>2. Laporan pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				3. Melaksanakan pemindahan narapidana beresiko tinggi ( <i>high risk</i> ) ke Lapas Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	Narkotika di UPT Masyarakatan yang ditetapkan 3. Laporan pemindahan narapidana beresiko tinggi ( <i>high risk</i> ) ke Lapas Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	
				B09: 1. Pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> 2. Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Masyarakatan yang ditetapkan 3. Melaksanakan pemindahan narapidana beresiko tinggi ( <i>high risk</i> ) ke Lapas Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	B09: 1. Laporan Pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas <i>maximum, medium, minimum</i> 2. Laporan Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Masyarakatan yang ditetapkan 3. Laporan pemindahan narapidana beresiko tinggi ( <i>high risk</i> ) ke Lapas Resiko Tinggi ( <i>high risk</i> )	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B12: Bintorwasdals	B12: Laporan Bintorwasdal	
		Pemberian hak secara tepat waktu kepada Narapidana melalui online sistem	Meningkatnya layanan pemberian Remisi, PB, CB dan CMB secara Online pada Lapas dan Rutan	B03: 1. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online	B03: 1. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online. 2. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online	
				B06: 1. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online	B06: 1. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: 1. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online	B09: 1. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online	
				B12: 1. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online 3. Bintorwasdal	B12: 1. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online 2. Laporan hasil Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online 3. Laporan Bintorwasdal	
		Keberlanjutan kegiatan industri di Lapas Produktif (Lapas minimum)	Meningkatnya jumlah WBP yang bekerja di Lapas Produktif	B03: 1. Usulan Kegiatan Industri di Lapas Produktif 2. Penerapan Instrumen kegiatan industri di Lapas Produktif	B03: 1. Dokumen Usulan Kegiatan Industri di Lapas Produktif 2. Laporan Penerapan Instrumen kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				3. Konstek pedoman penilaian kualitas hasil kegiatan industri di Lapas Produktif 4. Melakukan assesment terhadap WBP yang akan bekerja di Lapas Produktif 5. Menjalni Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelatihan dan pelaksanaan Industri di Lapas Produktif	industri diLapas Produktif 3. Laporan Konstek pedoman penilaian kualitas hasil kegiatan industri di Lapas Produktif 4. Laporan hasil assesment terhadap WBP yang akan bekerja di Lapas Produktif 5. MoU dengan pihak ketiga dalam rangka pelatihan dan pelaksanaan Industri di Lapas Produktif	
				B06: 1. Pelaksanaan Industri di Lapas Produktif 2. Memasarkan produk mnelalui sistem <i>e-commerce</i> dan upload hasil karya narapidana	B06: 1. Laporan pelaksanaan Industri di Lapas Produktif 2. Laporan pemasaran produk mnelalui sistem <i>e-commerce</i> dan upload hasil karya narapidana	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: 1. Pelaksanaan Industri di Lapas Produktif 2. Memasarkan produk mnelalui sistem <i>e-commerce</i> dan upload hasil karya narapidana	B09: 1. Laporan pelaksanaan Industri di Lapas Produkti 2. Laporan pemasaran produk mnelalui sistem <i>e-commerce</i> dan upload hasil karya narapidana	
				B12: Bintorwasdal	B12: Laporan Bintorwasdal	
		Meningkatnya fungsi pembimbingan klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan HAM	Terlaksananya penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	B03: Tersampainya Edaran penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	B03: Dokumen edaran penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	
				B06 1. Konstek pedoman Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan. 2. Pelaksanaan penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	B06: 1. Laporan Konstek pedoman Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan. 2. Laporan Pelaksanaan penilaian perubahan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
					perilaku dan pemenuhan kebutuhan	
				B09 Pelaksanaan penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	B09: Laporan pelaksanaan penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	
				B12 Bintorwasdal	B12 Laporan Bintorwasdal	
		Meningkatkan fungsi pengelolaan basan dan baran dalam rangka jaminan perlindungan atas barang bukti yang disita atau dirampas agar terjaga nilai dan keutuhannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT di wilayah</li> <li>2. Terlaksananya registrasi basan baran menggunakan aplikasi barcode di Rupbasan yang dijadikan pilot project</li> <li>3. Terintegrasinya data antara rupbasan dan rutan</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstek sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT</li> <li>2. Terinstalnya sistem pendataan berbasis IT di UPT Rupbasan</li> </ol>	B03: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Konstek sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT</li> <li>2. Laporan Terinstalnya sistem pendataan berbasis IT di UPT Rupbasan</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	B06: Laporan pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	
				B09: Pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	B09: Laporan pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	
				B12: Bintorwasdal	B12: Laporan Bintorwasdal	
		Meningkatnya kualitas pencegahan gangguan kamtib melalui optimalisasi fungsi intelejen	optimalisasi fungsi intelejen	B03: 1. Teresampaikannya Edaran tentang standar intelijen masyarakatan di wilayah 2. Konstek standar intelijen masyarakatan	B03: 1. Lapran teresampaikannya Edaran tentang standar intelijen masyarakatan di wilayah 2. Laporan Konstek standar intelijen masyarakatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Pelaksanaan intelejen	B06: Laporan Pelaksanaan intelejen	
				B09: Pelaksanaan intelejen	B09: Laporan Pelaksanaan intelejen	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum	1. Tersedianya Regulasi Teknis Pengamanan 2. Tersedianya petugas pengamanan yang profesional pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum	B03: Konstek SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum di wilayah	B03: Lapoaran konstek SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum di wilayah	
				B06: Pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	B06: Laporan pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: Pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	B09: Laporan pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	
				B12: Bintorwasdal	B12: Laporan Bintorwasdal	
		Pemenuhan hak identitas anak	Setiap anak mempunyai kartu identitas anak	B03. 1. Menginventarisir data Anak di LPKA yang belum mempunyai identitas diri 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan hak identitas 3. Perekaman data anak sebesar 100%	B03. 1. Data jumlah Anak yang belum memiliki identitas dari di LPKA 2. Laporan Rapat Koordinasi dengan stakeholder 3. Laporan Perekaman data anak sebesar 100	
				B06. Palaksanaan inventarisasi data anak di LPKA	B06. Laporan data 50% Anak yang direkam	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09. Pelaksanaan inventarisasi data anak di LPKA	B09. Laporan pelaksanaan pemenuhan identitas Anak dari Divisi Pas	
				B12. 1. Terpenuhinya identitas anak sebesar 50% 2. Bintorwasdal	B12. 1. Laporan terpenuhinya identitas anak sebesar 50% 2. Laporan Bintorwasdal	
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>						
19.	Meningkatnya Publikasi Pelaksanaan Kinerja Ditjenim, Kantor Wilayah dan UPT dalam rangka meningkatkan citra Positif Imigrasi	Terlaksananya penyebaran informasi melalui media elektronik, media cetak dan media sosial di masing-masing wilayah kerja	Terciptanya citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi di masing-masing wilayah kerja melalui aplikasi Intelijen Media Monitoring yang tingkat persentase publikasi positif sebesar 85%	B03: Publikasi kebijakan terkait pengawasan keimigrasian secara serentak di seluruh Indonesia 75% dari seluruh UPT yang ada di wilayah, minimal 3 media nasional/lokal <i>online</i>	B03: Laporan Dokumen Pelaksanaan	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B06: Publikasi kebijakan terkait pelayanan keimigrasian secara serentak seluruh Indonesia 75% dari seluruh UPT yang ada di wilayah, minimal 3 media nasional/lokal <i>online</i>	B06: Laporan Dokumen Pelaksanaan	
				B09: Penguatan publikasi terkait tuisi ditjenim secara serentak seluruh Indonesia 75% dari seluruh UPT yang ada di wilayah, minimal 3 media nasional/lokal <i>online</i>	B09: Laporan Dokumen Pelaksanaan	
				B12: Evaluasi kegiatan publikasi terkait tuisi Ditjenim	B12: Evaluasi dan Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi	
20.	Penguatan Peran Kepala Divisi Keimigrasian terhadap pencegahan TKI Non	Terlaksananya peran Divisi Keimigrasian dalam pelaksanaan supervisi di	Menurunnya penolakan keberangkatan TKI Non Prosedural di TPI sebesar 50% dari tahun 2018	B03: Internalisasi dengan UPT terkait penyampaian pencegahan TKI	B03: 1. Surat Kakanwil ke Kantor Imigrasi untuk pelaporan data	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
	Prosedural di Kantor Imigrasi dan/atau TPI	Kantor Imigrasi dan/atau TPI		Non Prosedural di Kantor Imigrasi dan/atau TPI	penundaan penerbitan paspor dan penolakan keberangkatan di Kantor Imigrasi dan/atau TPI 2. Laporan dan dokumen	
				B06: 50% Kanim dan/atau TPI melakukan penolakan atau sosialisasi terhadap TKI NP	B06: Laporan dan dokumen	
				B09: 75% Kanim dan/atau TPI melakukan penolakan atau sosialisasi terhadap TKI NP	B09: Laporan dan dokumen	
				B12: Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian ke UPT	B12: Laporan dan dokumen	
21.	Pembentukan dan Penguatan Pengawasan Keimigrasian melalui penguatan TIM PORA	Terlaksananya Penegakan Hukum Keimigrasian melalui Penguatan TIM PORA	Terlaksananya kegiatan pengawasan Orang Asing melalui TIM PORA sampai tingkat Kecamatan	B03: 1. Pembentukan TIM PORA tingkat Kecamatan yang belum dibentuk pada tahun 2018 sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan Kecamatan di Ibukota Provinsi.	B03: 1. SK TIM PORA 2. Laporan dan dokumentasi pelaksanaan	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				2. Penguatan peran TIM PORA yang telah dibentuk sampai dengan tingkat Kecamatan.		
				B06: 1. Pembentukan TIM PORA tingkat Kecamatan yang belum dibentuk pada tahun 2018 sebesar 40% dari jumlah keseluruhan Kecamatan di Ibukota Provinsi. 2. Penguatan peran TIM PORA yang telah dibentuk sampai dengan tingkat Kecamatan. 3. Rapat Koordinasi TIM PORA pada tingkat : a. Wilayah Provinsi minimal 1 kali, b. Wilayah Kabupaten dan Kota 20% dihitung dari jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah kerja masing-masing.	B06: Laporan dan dokumentasi pelaksanaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				B09: 1. Pembentukan TIM PORA tingkat Kecamatan yang belum dibentuk pada tahun 2018 sebesar 60 % dari jumlah keseluruhan Kecamatan di Ibukota Provinsi. 2. Penguatan peran TIM PORA yang telah dibentuk sampai dengan tingkat Kecamatan. 3. Rapat Koordinasi TIM PORA pada tingkat : a. Wilayah Provinsi minimal 1 kali, b. Wilayah Kabupaten dan Kota 30% dihitung dari jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah kerja masing-masing. 4. Pelaksanaan operasi gabungan TIM PORA sampai tingkat Kecamatan, minimal 1 kali.	B09: Laporan dan dokumentasi pelaksanaan	
				B12: 1. Pembentukan TIM PORA tingkat Kecamatan yang belum dibentuk pada tahun 2018 sebesar 80 % dari	B12: Laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				jumlah keseluruhan Kecamatan di Ibukota Provinsi. 2. Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Operasi Tim PORA tingkat Kecamatan		
22.	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian	Terlaksananya Penegakan Hukum Keimigrasian berupa Penyidikan dan/atau Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK)	Tercapainya 80% Jumlah Penyidikan dan/atau Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dari target yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dengan Dirjen Imigrasi	B03: Penyidikan dan/atau Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) sebesar 20% dari target yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dengan Dirjen Imigrasi	B03: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	
				B06: Penyidikan dan/atau Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dengan Dirjen Imigrasi	B06: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	
				B09: Penyidikan dan/atau Tindakan Administrasi Keimigrasian	B09: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				(TAK) sebesar 75% dari target yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dengan Dirjen Imigrasi		
				B12: 1. Penyidikan dan/atau TAK sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dari Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dengan Dirjen Imigrasi 2. Evaluasi dan Laporan	B12: Laporan Hasil Kegiatan (LHK) dan dokumentasi	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H.LAOLY